

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**KARAKTERISTIK KELOMPOK MASYARAKAT NELAYAN
POLE AND LINE DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN
TANGKAP IKAN CAKALANG DI KELURAHAN TOMALOU
KOTA TIDORE PROVINSI MALUKU UTARA**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Kelautan
Bidang Minat Manajemen Perikanan**

Disusun Oleh :

SYAMSUL BAKHRI HUSEIN

NIM. 015215184

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2010**

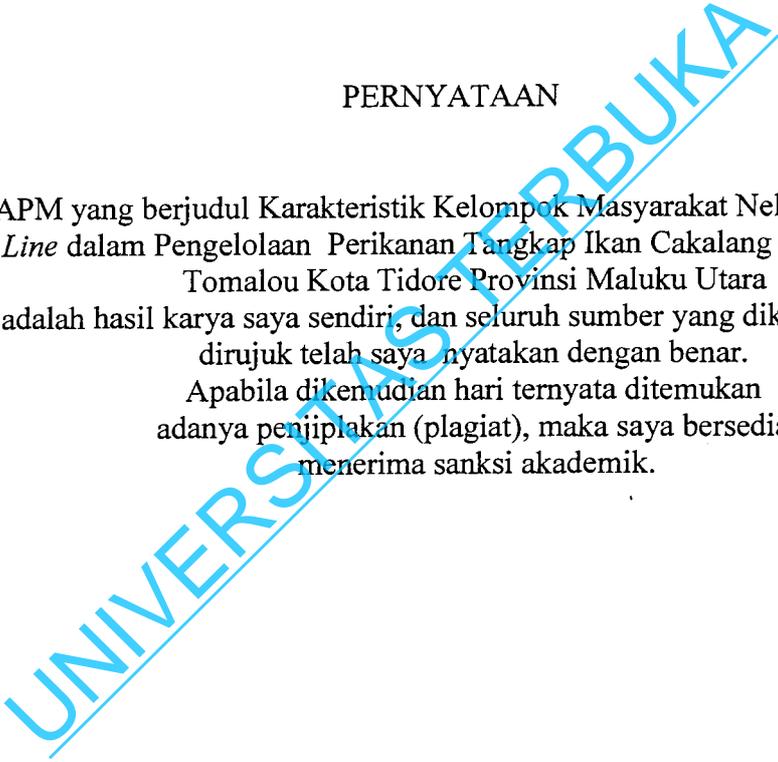
**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU KELAUTAN BIDANG MINAT
MANAJEMEN PERIKANAN**

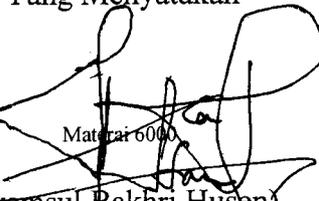
PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Karakteristik Kelompok Masyarakat Nelayan *Pole and Line* dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Ikan Cakalang di Kelurahan Tomalou Kota Tidore Provinsi Maluku Utara adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Ternate, 17 Juli 2010

Yang Menyatakan



A1A57AAF546229426
ENAM RIBU RUPIAH
6000  
Meterai 6000
(Syamsul Bakhri Husen)
NIM 015215184

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU KELAUTAN BIDANG MINAT
MANAJEMEN PERIKANAN**

PENGESAHAN

Nama : Syamsul Bakhri Husen

NIM : 015215184

Program Studi : Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan

Judul TAPM : Karakteristik Kelompok Masyarakat Nelayan *Pole and Line* dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Ikan Cakalang di Kelurahan Tomalou Kota Tidore Kepulauan

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu /17 Juli 2010

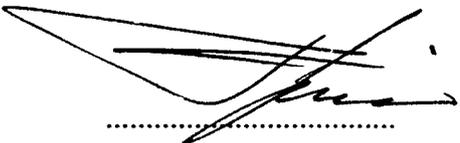
Waktu : 08.15 – 10.15

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Surachman Dimiyati, Ph.D



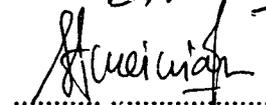
Penguji Ahli

Nama : Prof.Dr.Ir.Mulyono S.Baskoro



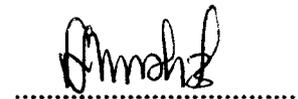
Pembimbing I

Nama : Dr. Sitti Masniah Djabir, MP



Pembimbing II

Nama : Dr. Amalia Sapriati



LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Karakteristik Kelompok Masyarakat Nelayan *Pole and Line* dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Ikan Cakalang di Kelurahan Tomalou Kota Tidore Provinsi Maluku Utara

Penyusun TAPM : Syamsul Bakhri Husen

NIM : 015215184

Program Studi : Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan

Hari/Tanggal : Sabtu/17 Juli 2010

Menyetujui :

Pembimbing II,



Dr. Amalia Sapriati
NIP. 19600821 198601 2 001

Pembimbing I,



Dr. Sitti Masniah Djahir, S.Pi.,MP
NIP.19730502 200501 2 010

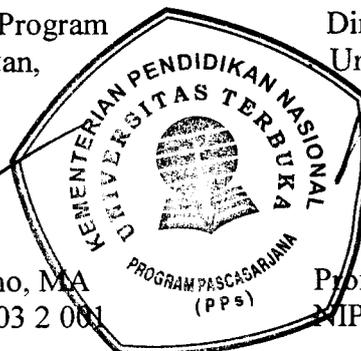
Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/ Program
Magister Ilmu Kelautan,



Dra. Agnes P. Sudarmo, MA
NIP. 19631007 198903 2 001

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Terbuka




Prof. Dr. H. Udin S. Winaputra, MA
NIP. 19451007 197302 1 001

ABSTRAK
**Karakteristik Kelompok Masyarakat Nelayan *Pole and Line* dalam
Pengelolaan Perikanan Tangkap Ikan Cakalang
di Kelurahan Tomalou Kota Tidore Provinsi Maluku Utara**

Syamsul Bakhri Husen
Husenmmps2@yahoo.co.id
Universitas Terbuka

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) menganalisis lembaga sosial masyarakat nelayan dalam pengelolaan wilayah pesisir; (2) menganalisis ciri ekonomi masyarakat nelayan Tomalou Kota Tidore sebagai wadah dalam memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir, dan (3) merumuskan strategi masyarakat nelayan dalam mengelola sumberdaya pesisir guna peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Pengumpulan data dengan menggunakan metode survey dan wawancara terhadap nelayan sebagai pelaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Karakteristik kelompok nelayan di Kelurahan Tomalou adalah melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *Pole and Line*. Kelompok nelayan ini melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menentukan *fishing ground* (daerah penangkapan ikan) berdasarkan hasil pemantauan juragan sebagai pemimpin operasional penangkapan. Sebelum melakukan operasional penangkapan ikan dilakukan acara selamatan sebagai simbol kepercayaan masyarakat setempat.

Ciri ekonomi nelayan berdasarkan hasil penelitian adalah sistem bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga sosial kelompok nelayan Tomolou menerapkan “Sistem Bagi Dua” yaitu satu bagian pemilik kapal dan satu bagian untuk anak buah kapal. Kedua, Hasil analisis menunjukkan distribusi pendapatan antara pemilik kapal dan anak buah kapal dalam lembaga sosial kelompok nelayan Tomolou 1 : 8,3 mengacu pada undang-undang bagi hasil perikanan tahun 1964 distribusi pendapatan belum menunjukkan keseimbangan.

Ketiga, berdasarkan hasil analisis SWOT strategi masyarakat nelayan dalam mengelola sumberdaya pesisir guna peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dapat ditempuh dengan melakukan 3 kluster strategi, yaitu pemberdayaan masyarakat (*community development*), peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan upaya pelestarian lingkungan (*Continuing environment*).

Kata Kunci : *kelompok relayan pole and line, pengelolaan perikanan tangkap*

ABSTRACT**Characteristics of Community Groups Pole and Line Fisherman in the Management of Fishing Skipjack in the Village Tomalou, Tidore City, North Molucas Province**

Syamsul Bakhri Husen
Husenmmps2@yahoo.co.id
Universitas Terbuka

The goal of this research are : (1) to analyze the social organization of fishing in coastal zone management; (2) to analyze the economic characteristics of Tomalou fishing communities in Tidore City as a place to use of coastal resource, and; (3) to formulate a community strategy fisherman in managing coastal resource in order to increase the welfare of fishing communities..

The result showed that the first, group characteristics of fisherman in the Tomalou village is to conduct fishing activities using gear Pole and Line. These groups of fisherman engaged in fishing in the sea determined the fishing ground by ships owner as operational leaders. Before conducting fishing operations, they carried out a ritual for safety event as a symbol of confidence in the local community

Based on result research, the economic characteristics of fisherman is aprofit-sharing system, implemented by social institutions Tomalou fisherman using "System for Two (or Two Share System)", means one part for the ships owner and the other one for crews. Second, the analysis shows the distribution of income between owners of the ship and the crews in social institutions group of Tomolou fisherman 1 : 8,3 refers to the laws for the fishery in 1964, that has yet to show a balance of income distribution.

Third, based on the results of SWOT analysis strategies of fishing communities in managing coastal resources in order to improve the wlfare of fishing communities can be achieved through 3 clusters of strategy, namely the empowerment of communities (community development), capacity (capacity building) and nature conservation (continuing environment).

Keyword : *Pole and line Fisherman, fisheries management.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan Ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM ini. TAPM disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka di UPBJJ Ternate Maluku Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan TAPM ini, berbagai pihak telah memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif, maka selayaknyalah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Sitti Masniah Djabir, S.Pi.,MP, selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Amalia Sapriati, selaku Pembimbing II yang telah memberikan kritikan dan saran-saran yang merupakan sumbangan yang sangat berarti dalam penyusunan TAPM ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mulyono S. Baskoro, selaku penguji ahli dan Bapak Surachman Dimiyati, Ph.D selaku ketua komisi penguji yang telah memberikan sumbangan pemikirannya dalam penyempurnaan TAPM ini.
3. Ketua Bidang Ilmu Program Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan Ibu Dra. Agnes P. Sudarmo, MA yang telah membantu dan memberikan arahan pada penulis dari mulai pendidikan hingga penyusunan TAPM ini.
4. Direktur Program Pascasarjana Bapak Prof. Dr. Udin S. Winataputra dan Kepala UPBJJ-Ternate Bapak Ir. Mulyadi, M.Si beserta seluruh jajarannya

yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti Program Magister (S2) pada Universitas Terbuka.

5. Pejabat pemerintah daerah sampai pejabat desa yang menjadi lokasi penelitian penulis. Tak lupa pada semua responden dan informan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan selama penulis melakukan penelitian. Atas bantuan dan partisipasinya, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Hi. Ishak Husen dan Ibunda Hj. Sitti San Hi. M. Nur atas doa restu serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Ucapan terimakasih kepada Istri tercinta Dra. Conny V. Polii atas, motivasi, serta doa restunya serta perhatian yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Kepada Ananda tersayang Gladys Yulianti Husen, Rahmat Bahari Husen dan Cahya Sulistiawati Husen yang merupakan sumber inspirasi dan dorongan bagi penulis untuk selalu berbuat yang lebih baik.

Akhir kata penulis mengharapkan TAPM ini bisa bermanfaat bagi kita semua.....Amin.

Ternate, 17 Juli 2010

Syamsul B. Husen

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR ORIGINALITAS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Pengertian Kelompok Masyarakat Nelayan.....	8
2. Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Nelayan.....	11
3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Nelayan.....	13
4. Sumber Hayati Perairan, Pemanfaatan dan Pelestrarian Lingkungan.....	16
5. Pengembangan Masyarakat Pantai.....	20
B. Kerangka Pikir.....	32

C. Definisi Operasional	33
BAB III. METODE PENELITIAN	34
A. Desain Penelitian	34
B. Populasi dan Sampel	35
C. Instrumen Penelitian	35
D. Prosedur Pengumpulan Data	35
E. Metode Analisis Data	36
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Keadaan Fisik Wilayah	39
2. Keadaan Sosial Ekonomi	41
3. Keadaan Perikanan Tangkap Kota Tidore Kepulauan ...	44
B. Deskripsi Lembaga Sosial Kelompok Nelayan <i>Pole and Line</i> Kelurahan Tomolou.....	46
C. Ciri Ekonomi Kelompok Nelayan <i>Pole and Line</i>	63
1. Penerapan Sistem Bagi Hasil	63
2. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil	65
3. Distribusi Pendapatan	65
D. Bentuk Kegiatan Kelompok Masyarakat Nelayan Tomalou dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pelestarian Lingkungan	69
1. Bentuk Kegiatan Kelompok Masyarakat Nelayan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	69
2. Kegiatan Kelompok Masyarakat Nelayan Dalam Pelestarian Lingkungan Laut	76
E. Strategi dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Nelayan Tomalou Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap dan Pelestarian Lingkungan	78
1. Identifikasi Permasalahan	78

2. Identifikasi Potensi dan Permasalahan Melalui Metode SWOT	81
3. Strategi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Nelayan <i>Pole and Line</i> Tomalou	87
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	95
A. Simpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	100

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Matriks Analisis SWOT	38
Tabel 4.1. Pembagian Daerah Administrasi dan Luas Wilayah Kelurahan Tomalou	39
Tabel 4.2. Keadaan Rumah Penduduk di Kelurahan Tomalou	41
Tabel 4.3. Penduduk Kelurahan Tomalou Berdasarkan Jenis Kelamin ..	41
Tabel 4.4. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Tomalou	42
Tabel 4.5. Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Tomalou	42
Tabel 4.6. Jenis dan Jumlah Fasilitas dan Pusat Pelayanan	43
Tabel 4.7. Perkembangan Jumlah Armada Penangkapan Ikan di Kelurahan Tomalou	44
Tabel 4.8. Peran dan Fungsi anggota Kelompok Nelayan <i>Pole and line</i> Kelurahan Tomalou	62
Tabel 4.9. Analisis Deskripsi Lembaga Sosial Kelompok Nelayan <i>Pole and line</i> Kelurahan Tomalou	62
Tabel 4.10. Nilai Penerimaan Sistem Bagi Hasil Anggota Kelompok Nelayan <i>Pole and Line</i> Tomalou.....	64
Tabel 4.11. Analisis SWOT Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Nelayan Tomalou	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pikir	32
Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian	34
Gambar 4.1. Gambar Kapal Penangkapan Ikan <i>Pole and Line</i> Nelayan Kelurahan Tomolou	48
Gambar 4.2. Struktur Keanggotaan Kelompok Nelayan <i>Pole and Line</i> Kelurahan Tomalou	51

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Informan Yang Diwawancara Selama Penelitian .	100
Lampiran 2. Daftar Nama-Nama Kelompok Nelayan di Tomalou	101
Lampiran 3. Perincian Biaya Operasional 1 Trip (5 hari)	102
Lampiran 4. Transkrip Hasil Wawancara.....	103
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	104

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor perikanan khususnya perikanan laut merupakan upaya untuk memadukan aspek teknis, sosial ekonomi dan struktur kelembagaan di wilayah pantai dengan memperhatikan keadaan sumberdaya alam yang ada, masyarakat nelayan, struktur dan lembaga pasar, faktor-faktor yang berpengaruh pada aspek-aspek penawaran, dan permintaan pasar serta nilai-nilai sosial yang ada (Kusnadi, 2000).

Umumnya masyarakat nelayan masih hidup dalam keterbatasan baik keterbatasan ekonomi, sosial, politik maupun keterbatasan dalam bidang pendidikan. Keterbatasan ekonomi ini tampak pada tingkat pendapatan nelayan yang pada umumnya masih rendah, keterbatasan sosial lebih terwujud pada ketidakmampuan masyarakat nelayan dalam mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar dan lemahnya pengembangan organisasi keluar lingkungan sebagai akibat dari dominasi negara yang kuat terhadap masyarakat nelayan (Kusnadi, 2002).

Kota Tidore Kepulauan dengan ibukota Soa-Sio adalah suatu wilayah pemerintahan yang membentang di bagian Barat Propinsi Maluku Utara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan dan Kecamatan Pulau Moti (Kota Ternate), Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Ternate, (Kota Ternate) dan Kecamatan Jailolo (Kabupaten Halmahera Barat), sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wasile Selatan

(Kabupaten Halmahera Timur) dan Kecamatan Weda (Kabupaten Halmahera Timur), dan Sebelah Barat Berbatasan dengan Laut Maluku. Luas total wilayah pemerintahan Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan UU No 1 Tahun 2003 seluas 13.862,86 km². Luas wilayah tersebut terbagi dalam lima kecamatan yakni Tidore, Tidore Utara, Tidore Selatan, Oba dan Kecamatan Oba Utara (BPS Kota Tidore, 2008).

Perairan laut Tidore Kepulauan memiliki kekayaan sumberdaya perikanan dengan *standing stock* sebesar 81.000 ton/tahun dengan potensi pemanfaatan lestari sebesar 48.800 ton/tahun. Tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan hingga saat ini belum dilakukan secara optimal. Tahun 2006 tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan baru mencapai 8291,8 ton/tahun atau sekitar 16,98% dari MSY, meliputi ikan pelagis, ikan demersal serta biota laut lainnya (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore, 2007).

Pelaksanaan pembangunan Kota Tidore lewat program dan kegiatannya, berusaha untuk terus mewujudkan visi pembangunan 2005 – 2010 yakni *Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan yang Maju, Berbudaya dan Mandiri dan sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan dikenal dengan istilah otonomi daerah, dimana titik sentral pembangunan terletak di kabupaten/kota, maka akan memacu eksploitasi sumberdaya alam di kabupaten/kota yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Maluku Utara, maka salah satu prioritas pembangunannya adalah mengembangkan potensi pesisir dan kelautan melalui pendekatan kawasan-kawasan yang diharapkan akan semakin terpadu dan menyeluruh, dimana salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi*

sumberdaya pesisir dan laut yaitu Kota Tidore Kepulauan. Penentuan pengembangan kawasan-kawasan di wilayah pesisir diharapkan akan dilakukan seobjektif mungkin dengan data dan informasi yang lengkap mengenai potensi, keterbatasan-keterbatasan atau kerentanan dari kawasan serta arahan pengembangannya (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore, 2008)

Pengembangan sektor perikanan di tingkat nelayan yang merupakan mayoritas mata pencaharian masyarakat pesisir, tidak terlepas dari pengembangan perikanan secara keseluruhan, karena keduanya mempunyai keterkaitan fungsional (Sugiarto, 1997). Keterkaitan kepentingan antar pelaku dan antar organisasi ekonomi dapat ditunjukkan dalam suatu kelembagaan usaha kerja.

Upaya pengelolaan sumberdaya pesisir harus merupakan upaya-upaya untuk memadukan aspek-aspek teknis, sosial ekonomi dan struktur kelembagaan yang ada di pola khusus wilayah pesisir dengan memperhatikan keadaan sumberdaya yang ada, masyarakat nelayan, struktur dan lembaga pasar, faktor-faktor yang berpengaruh di dalam aspek-aspek penawaran, permintaan pasar serta nilai-nilai sosial yang ada (Kusnadi, 2000). Oleh karena itu, perlu adanya pemanfaatan kelembagaan masyarakat nelayan baik berbentuk formal, seperti koperasi, kelompok tani/nelayan lembaga keuangan perkreditan, lembaga kemitraan, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan sebagainya maupun kelembagaan non formal seperti bentuk kerjasama antar individu, lembaga pasar input dan output, lembaga keagamaan, dan sebagainya yang seluruhnya merupakan sumber modal dasar masyarakat di wilayah pesisir.

Melihat potensi wilayah Kota Tidore khususnya desa Tomalou yang merupakan daerah pesisir, maka pengembangan usaha perikanan akan menjadi salah satu andalan bagi kehidupan ekonomi rakyat. Namun kondisi di lapangan menunjukkan keterpurukan nelayan masih memprihatinkan. Hal ini sangat penting diperhatikan karena walaupun potensi laut kota Tidore sangat besar dan sampai saat ini baru tereksplorasi sekitar 20% saja (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore, 2008), namun pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan melalui peningkatan eksplorasinya tidak serta merta dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan keluarga nelayan tradisional, bahkan di balik peran strategis dan prospek yang cerah dari ekosistem pesisir dan lautan beserta sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya bagi pembangunan daerah, justru mengalami berbagai kendala dan kecendrungan yang mengancam kapasitas berkelanjutan (*sustainable capacity*).

Menurut Kusnadi (2000), berbagai kenyataan di lapangan menunjukkan paling sedikit empat kendala yang secara simultan dan berkelanjutan membebani iklim usaha nelayan, yaitu:

1. Sistem bagi hasil perikanan di setiap daerah masih menggunakan sistem bagi hasil dari tradisi setempat, dimana bagian terbesar diterima oleh punggawa (pemilik kapal). Pada kasus ini idealnya kelembagaan aparatur beserta pihak terkait lainnya melakukan intervensi dalam bentuk sosialisasi sistem bagi hasil perikanan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Tidak adanya jaminan stabilitas harga ikan, terutama pada saat hasil berlebih, mengingat sifat produk perikanan yang mudah busuk, kemudian tidak dibarengi dengan penerapan teknik penanganan dan pengawetan

yang memadai. Akibatnya kendati nelayan dapat memperoleh hasil tangkapan dalam kuantitas yang banyak tetapi tidak diikuti oleh peningkatan jumlah pendapatan mereka.

3. Rendahnya kemampuan keluarga nelayan untuk melakukan diversifikasi usaha pada musim paceklik (minimal 4 bulan dalam setahun), memaksa mereka untuk menggantungkan kelangsungan hidup keluarganya pada pemilik kapal.
4. Kurangnya informasi dan pelatihan kepada nelayan tradisional dalam mengeksploitasi sumberdaya hayati laut seoptimal mungkin serta upaya daripada pelestarian sumberdaya hayati laut, sehingga tindakan-tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan serta semakin berkurangnya sumberdaya hayati laut masih dianggap sesuatu yang wajar.

Menyadari akan semua pertimbangan di atas maka sudah saatnya segala potensi wilayah pesisir Kota Tidore Kepulauan diberdayakan untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah dan memberikan sumbangan terhadap PAD kota. Pengembangan ekonomi wilayah pesisir mencakup dua sasaran utama, masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan sumberdaya alam sebagai sumber ekonomi. Oleh karena itu kajian penelitian dengan judul "Karakteristik Kelompok Masyarakat Nelayan Alat Tangkap Pole and Line dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Ikan Cakalang Di Desa Tomalou Kota Tidore Provinsi Maluku Utara" dilakukan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka disusunlah masalah penelitian sebagai berikut :

- (1) Bagaimana deskripsi lembaga sosial kelompok nelayan alat tangkap pole and line Tomalou dalam pengelolaan perikanan tangkap?
- (2) Bagaimana ciri ekonomi masyarakat nelayan Tomalou Kota Tidore sebagai wadah dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan tangkap?
- (3) Bagaimana strategi masyarakat nelayan dalam mengelola sumberdaya perikanan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- (1) Menganalisis lembaga sosial masyarakat nelayan alat tangkap pole and line Tomalou dalam pengelolaan perikanan tangkap
- (2) Menganalisis ciri ekonomi masyarakat nelayan Tomalou Kota Tidore sebagai wadah dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan tangkap.
- (3) Merumuskan strategi masyarakat nelayan dalam mengelola sumberdaya sumberdaya perikanan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

D. Kegunaan Penelitian

- (1) Secara akademis, hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan dalam upaya pemanfaatan sumberdaya perikanan.

- (2) Maksud praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran kelompok masyarakat setempat agar lebih efisien dan berproduktivitas tinggi dalam pengelolaan perikanan tangkap untuk pengembangan pembangunan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Sebagai bahan masukan bagi PEMDA Tidore dalam pengembangan usaha perikanan laut khususnya di pantai Tomalou Kota Tidore.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Kelompok Masyarakat Nelayan

Manusia seutuhnya adalah suatu kompleks dinamika dari ide-ide, kekuatan-kekuatan dan kemungkinan-kemungkinan. Dengan motivasi dan hubungan-hubungan dalam kehidupan serta perubahan-perubahannya, manusia mendiferensiasikan peranan-peranannya antara lain sebagai nelayan, petani, pedagang, politisi, ataupun sebagai anggota keluarga sebagaimana adanya (Soekanto, 1990).

Selanjutnya dikatakan bahwa manusia hidup bersama satu sama lain dan bertindak secara berbalas-balasan serta berinteraksi dengan orang-orang lain di sekitarnya. Interaksi terjadi berdasarkan motivasi-motivasi atau dorongan-dorongan dan tujuan-tujuan tertentu. Dalam berinteraksi, seseorang sebagai pelaku berusaha membebaskan diri dari ikatan-ikatan tertentu kepribadiannya berkenaan dengan penyesuaian tingkah lakunya kepada pelaku lainnya. Demikian pula pelaku lain terhadapnya. Kemampuan orang-orang membebaskan atau melonggarkan diri dari ikatan-ikatan itu merupakan sosiabilitasnya. Dengan sosiabilitas orang-orang membentuk satuan-satuan sosial dalam masyarakat pada umumnya. Di dalam masyarakat ada orang yang mempunyai sosiabilitas yang tinggi dan ada yang rendah. Juga ada orang-orang yang satu sama lain mempunyai sosiabilitas yang relatif lebih tinggi daripada orang-orang lain. Biasanya mereka itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-

kepentingan spesifik yang mengikat atau menggabungkan dan membawanya berinteraksi satu sama lain secara teratur dan sambung menyambung dalam jangka waktu yang lama. Mereka yang demikian itu merupakan kelompok sosial. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa sosiabilitas manusia mewujudkan kelompok-kelompok sosial masyarakat umumnya. Kehidupan sosial seseorang dimulai dan lebih banyak berlangsung dalam berbagai tipe kelompok sosial.

Sejenis kelompok sosial yang terdapat di dalam masyarakat yaitu kelompok masyarakat nelayan. Kelompok nelayan ini terdiri dari para nelayan dan mempunyai peran di bidang perikanan khususnya dalam usaha penangkapan ikan di laut. Khusus di kalangan masyarakat Kota Tidore Propinsi Maluku Utara, Kelompok nelayan ini terdiri dari pemilik kapal yang disebut pemimpin kelompok dan para pengikutnya disebut anak buah kapal.

Kelompok masyarakat nelayan merupakan kelompok kecil yang berusia relatif tua. Dari pengkajian kelompok masyarakat nelayan ini sedikitnya dapat diperoleh gambaran mengenai kelompok masyarakat nelayan yang memudahkan untuk mengetahui dinamika sosial pada masyarakat dimana kelompok yang bersangkutan menjadi bagian dari perangkat atau merupakan suatu sistem dari suatu sistem sosial yang lebih besar (Sallatang, 1982).

Menurut Kusnadi (2002) pada dasarnya, penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. *Pertama*, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan lain), struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak mempunyai alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu,

nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak secara terbatas. Dalam masyarakat pertanian, nelayan buruh identik dengan buruh tani.

Kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya. *Ketiga*, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan nelayan tradisional.

Menurut Mattulada (1997), masyarakat pesisir adalah sekelompok manusia yang hidup bekerjasama di suatu daerah tertentu yang disebut pantai. Sementara itu orang yang bertempat tinggal di pesisir pantai dan mempunyai mata pencaharian pokok sebagai penangkap ikan dan hasil laut lainnya disebut nelayan.

Sedangkan menurut Soemardjan dalam Sunarto (1993), masyarakat nelayan adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, sehingga setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu kesatuan manusia menjadi satu masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupan dalam batas-batas kesatuannya termasuk mata pencahariannya.

Menurut Kusnadi (2002) masyarakat nelayan ditinjau dari aspek ekonomi memiliki stratifikasi sebagai berikut : (1) nelayan kaya yang mempunyai kapal yang mempekerjakan nelayan lain sebagai pendega tanpa dia sendiri ikut bekerja;

(2) nelayan kaya yang mempunyai kapal tetapi ia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal; (3) nelayan sedang yang kebutuhan hidupnya dapat ditutupi dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan, dan mempunyai perahu tanpa mempekerjakan tenaga dari luar keluarga; (4) nelayan miskin yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga harus ditambah dengan bekerja lain untuk kebutuhannya beserta istri dan anaknya; (5) nelayan pendega atau nelayan sawi yang tidak mempunyai perahu, sehingga kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan bekerja sebagai awak kapal.

Dilihat dari aspek teknologi penangkapan, nelayan tradisional pada umumnya cukup terampil dengan peralatan yang dimilikinya yang merupakan sarana tangkap dengan kemampuan terbatas tetapi sukar untuk ditingkatkan kearah modernisasi. Sumberdaya manusia (pendidikan rendah) dan posisi ekonomi nelayan yang sangat rendah karena modal terbatas, produktifitas rendah dengan hasil tangkapan yang tidak menentu karena pengaruh musim serta jaminan pemasaran yang tidak menentu pula karena berbagai kendala. Keadaan ini akan menyulitkan dalam proses transformasi teknologi yang akhirnya menghambat transformasi struktural masyarakat nelayan kearah kondisi lebih baik. Kondisi prasarana dan sarana seperti jalan, dermaga, pasar, TPI, dok serta *cold storage* dan pabrik es belum menunjang upaya peningkatan produksi dan mutu hasil tangkapan nelayan (Setyohadi, 2000).

2. Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Nelayan

Tingkat sosial ekonomi yang rendah merupakan ciri umum kehidupan nelayan di mana pun berada. Tingkat kehidupan mereka sedikit di atas pekerja migran atau setaraf dengan petani kecil. Bahkan jika dibandingkan secara

seksama dengan kelompok masyarakat lain disektor pertanian, nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan kecil atau nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin (Kusnadi, 2002).

Kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat nelayan berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan ke dalam faktor alamiah dan non alamiah. Faktor alamiah berkaitan dengan fluktuasi musim-musim penangkapan ikan dan struktur alamiah sumberdaya ekonomi desa. Faktor non alamiah berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja, lemahnya penguasaan jaringan hasil tangkapan dan belum berfungsinya koperasi nelayan yang ada, teknologi konservasi atau pengolahan yang sangat tradisional, serta dampak negatif orientasi produktivitas yang dipacu oleh kebijakan motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap (*revolusi biru*) yang telah berlangsung sejak tiga dasa warsa (Suyanto, 1993).

Kendala yang tergolong dalam masalah sosial ekonomi dan budaya meliputi (1) terbatasnya sarana dan prasarana produksi, (2) fluktuasi harga produk perikanan yang dihasilkan, sehingga menyulitkan perencanaan bisnis, khususnya dalam membuat prediksi biaya hasil (*out put*) produksi serta (3) masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia perikanan. Seringkali terjadi lahan yang sesuai untuk budidaya komoditas tertentu terdapat pada lokasi terpencil, yang belum memiliki sarana dan prasarana pendukung seperti penerangan, sarana telekomunikasi, air bersih dan perhubungan, sehingga investor harus berinvestasi pula untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana

tersebut. Dengan demikian biaya investasi menjadi sangat tinggi Kusnadi (2002).

Selanjutnya dikatakan bahwa desa-desa pesisir adalah kantong-kantong kemiskinan struktural yang potensial. Kesulitan mengatasi kemiskinan di desa-desa pesisir telah menjadikan penduduk di kawasan ini harus menanggung beban kehidupan yang tidak dapat dipastikan kapan masa berakhirnya. Kerawanan bidang sosial ekonomi dapat menjadi lahan subur bagi timbulnya kerawanan-kerawanan di bidang kehidupan lain. Masalah-masalah sosial ekonomi adalah persoalan yang rumit dalam kehidupan masyarakat pesisir/nelayan. Kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas kehidupan mereka dan peningkatan sumberdaya manusia. Berbagai program pembangunan untuk perbaikan kehidupan mereka belum mencapai hasil yang maksimal. Pemberian bantuan kredit bergulir dan program IDT mengalami kemacetan, serta bantuan perahu bermotor atau mesin perahu juga mengalami nasib yang sama gagal meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan. Tidak sedikit program bantuan dari pemerintah jatuh pada pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya.

3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Nelayan

Menurut Arifin, (2001), lembaga dalam masyarakat terdiri atas; kelembagaan masyarakat desa (dalam penelitian ini disebut kelembagaan masyarakat nelayan) dan organisasi di tingkat nelayan. Kelembagaan masyarakat desa dapat diartikan berbagai "norma lama" atau aturan-aturan sosial yang telah berkembang secara tradisional dan terbangun atas budaya lokal sebagai komponen dan pedoman pada beberapa jenis/tingkatan lembaga sosial yang saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat nelayan untuk

mempertahankan nilai. Norma lama yang dimaksud yaitu aturan-aturan sosial yang merupakan bagian dari “lembaga sosial” dan simbolisasi yang mengatur kepentingan masyarakat dimasa lalu.

Permasalahan kelompok meliputi: (1) keterbatasan pelayanan penyuluhan oleh pemerintah, (2) organisasi nelayan belum berkembang dengan baik oleh karena kualitas SDM masih sangat rendah dan (3) masih lemahnya dukungan dari lembaga keuangan bank dan non-bank dalam hal dukungan permodalan dan pengelolaan usaha (Arifin, 2001).

Dalam bidang pelayanan penyuluhan, permasalahan terjadi sebagai akibat terjadinya kesenjangan antara jumlah nelayan yang membutuhkan penyuluhan dengan jumlah tenaga penyuluh dan sarana/prasarana penunjang penyuluhan seperti balai penyuluh dan alat-alat demonstrasi. Di samping itu kualifikasi penyuluh pada tingkat PPS maupun PPL terutama dalam bidang budidaya laut masih perlu ditingkatkan. Kinerja penyuluhan perlu diperbaiki melalui peningkatan intensitas keterkaitan dengan unit-unit percobaan di tingkat propinsi sampai dengan tingkat kabupaten. Kegiatan ini akan mendorong kinerja PPS dan PPL serta meningkatkan fungsi penyuluhan yang ada di BIPP (Dianthani, dkk., 2003).

Selanjutnya dikatakan bahwa di Jepang kebijakan pengembangan perikanan secara nasional diformulasikan oleh suatu badan (komisi) yang terdiri atas wakil-wakil pemerintah (*Fisheries Agency*), wakil-wakil dari kelompok petani yang diutus oleh Federasi Koperasi Perikanan Nasional dan Tenaga Ahli. Sedangkan di Indonesia peranan kelompok nelayan masih sangat kecil, sehingga kebijakan

pengembangan perikanan masih sangat didominasi oleh pemerintah dan belum mencerminkan kebutuhan nelayan seutuhnya.

Pengembangan modal nelayan kurang sejalan dengan sistem perbankan yang berlaku. Dalam pengajuan kredit, seringkali nelayan dihadapkan kepada kesulitan untuk menyediakan agunan dalam jumlah tertentu sebagai jaminan kepada pihak perbankan. Di samping itu prosedur untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan bank maupun non-bank, bagi kalangan petani ikan dianggap masih sangat berbelit-belit, dibanding dengan cara memperoleh pinjaman modal dari rentenir (Kusnadi, 2002).

Kelembagaan yang perlu direvitalisasi untuk menunjang pengembangan budidaya laut dan pantai meliputi kelembagaan penyuluhan, kelompok tani dan keuangan. Revitalisasi lembaga penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan kesempatan nelayan memperoleh layanan penyuluhan sesuai dengan kebutuhannya. Revitalisasi kelompok nelayan dilakukan untuk mendorong nelayan membentuk kelompok dan meningkatkan kualitas kelompok melalui pemberdayaan anggota kelompok. Tindakan ini dilakukan guna memperkuat posisi tawar menawar nelayan. Revitalisasi lembaga keuangan dilakukan guna mempermudah nelayan mengakses modal dari perbankan dalam rangka pengembangan usaha (Arifin, 2001).

Penataan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pengembangan IPTEK dan diseminasi teknologi budidaya laut dan pantai perlu dilakukan. Di tingkat petani dan nelayan, pembentukan koperasi dan kelompok tani terbukti banyak membantu proses diseminasi. Adanya suatu sistem informasi perikanan nasional akan sangat membantu percepatan diseminasi maupun

penyampaian umpan balik. Di samping itu perlu disusun kurikulum dan muatan budidaya laut secara proporsional di lembaga-lembaga pendidikan formal, DIKLAT dan lembaga penyuluhan perikanan dan pertanian seperti STP, APP, Akademi Perikanan, SMK Perikanan, BIPP, BPP dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi diseminasi seperti Balai-balai Pengembangan, BPTP, BIPP, BPP maupun penyuluh dan kelompok tani - nelayan perlu lebih diberdayakan karena selain menjadi pemegang peranan penting dalam percepatan transfer teknologi dan informasi, mereka juga mengidentifikasi kebutuhan serta merakit paket teknologi spesifik lokasi berdasar sumberdaya yang tersedia untuk mendukung pembangunan wilayah.

4. Sumber Hayati Perairan, Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan

Definisi sumber hayati perairan (*aquatic resources*) adalah semua perairan yang memiliki sumber kekayaan hayati (khususnya ikan) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia (Afrianto, 1996). Selanjutnya Dahuri (2001) menyatakan bahwa wilayah pesisir dan lautan Indonesia, terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya yang dimiliki, yang terdiri dari sumberdaya alam yang dapat pulih dan sumberdaya alam yang tidak dapat pulih, sumberdaya yang dapat pulih antara lain, meliputi : sumber daya perikanan (plantonk, bentos, ikan, moluska, krustasea, mamalia laut), rumput laut (*sea weed*), padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang. Sedangkan sumberdaya yang tidak dapat pulih, antara lain mencakup: minyak dan gas, bijih besi, pasir, timah, bauksit, dan mineral serta bahan tambang lainnya. Berdasarkan potensinya, secara garis besar di wilayah pesisir dapat diklasifikasikan dalam beberapa sistem lingkungan (ekosistem) dan sumberdaya.

a. Ekosistem Terumbu Karang

Kawasan Perairan Indo-Pasific termasuk Indonesia, menjadi pusat mega biodiversity kelautan dunia. Kurang lebih 14 persen terumbu karang di dunia berada di Indonesia yang mencapai luas 75.000 kilometer persegi. Luas terumbu karang yang memiliki beragam manfaat tersebut merupakan sumber daya alam yang besar bagi Indonesia (Bengen, 2001).

Selanjutnya dinyatakan bahwa terumbu karang adalah rumah atau tempat berlindung berbagai biota laut lainnya. Berbagai jenis ikan, termasuk moluska, krustasea, ekinodermata dan rumput laut tumbuh subur disekitarnya. Perpaduan yang serasi antara karang dan biota lainnya membentuk ekosistem yang mempunyai nilai estetika yang tinggi, karena itu selain sebagai sumber perikanan yang sekaligus menjadi sumber penghidupan nelayan, terumbu karang karena keindahannya juga merupakan obyek wisata selam. Fungsi karang batu sendiri, baik yang hidup maupun yang telah mati, merupakan fondasi yang kokoh untuk melindungi pulau dan pantai dari gempuran ombak. Oleh karena itu terumbu karang jelas memiliki peran yang sangat besar dalam ekosistem lautan. Sebab itu kerusakan terumbu karang dapat menyebabkan terganggunya seluruh ekosistem laut dan pantai.

b. Ekosistem Hutan Mangrove

Areal mangrove di Indonesia tercatat sekitar 4,25 juta dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya mangrove telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti: kehutanan, perikanan (tambak), pertanian, industri, pemukiman, pertambangan, pariwisata dan lain-lain.

Hutan mangrove adalah tipe hutan yang khas yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Karena letaknya tersebut sehingga seringkali ia disebut pula sebagai hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau atau hutan bakau. Mangrove tumbuh subur pada tempat yang muara sungainya besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur dan pasir dan tidak dijumpai pada pantai yang terjal dan berombak besar dengan arus pasang-surut yang kuat karena hal ini memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur dan pasir sebagai substrat yang diperlukan untuk pertumbuhannya (Nontji, 1993).

Selanjutnya dinyatakan bahwa dari sektor perikanan, beberapa produk perikanan kita mempunyai hubungan erat dengan ekosistem mangrove seperti udang (*Penaeus*), kepiting bakau (*Scylla serata*), dan tiram (*Crassostrea*). Lokasi dan potensi produksi perikanan udang di Indonesia mempunyai kaitan erat dengan lokasi serta luas hutan mangrove di dekatnya. Di samping itu fungsi lain hutan mangrove adalah melindungi garis pantai dan erosi. Menurut saya melihat fungsi mangrove yang sangat penting maka diperlukan suatu upaya pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan demi kestabilan ekosistem wilayah pesisir.

c. Ekosistem Padang Lamun

Padang lamun (*sea grass beds*) terdapat pada perairan dangkal memiliki substrat yang lunak dan perairan cerah. Selain itu syarat lain untuk kehidupan padang lamun yaitu adanya sirkulasi air yang membawa nutrient dan substrat serta membawa pergi sisa-sisa metabolisme (Dahuri, 2001).

Pada daerah padang lamun hidup bermacam-macam biota laut seperti krustasea, molusca, cacing dan ikan. Secara ekologis padang lamun memiliki

beberapa fungsi penting bagi daerah pesisir yaitu: sumber utama produktivitas primer; sumber makanan penting bagi organisme (dalam bentuk detritus); menstabilkan dasar yang kuat dengan sistem perakaran yang padat dan saling menyilang; tempat berlindungnya organisme; tempat pembesaran bagi beberapa spesies yang menghabiskan masa dewasanya di lingkungan ini, misalnya udang dan ikan baronang, sebagai peredam arus sehingga menjadikan perairan sekitarnya tenang, sebagai tudung pelindung dari panas matahari yang kuat penghuninya (Nybakken, 1988).

d. Ekosistem Estuari

Estuari adalah teluk pesisir yang sebagian tertutup, tempat air tawar dan air laut bertemu dan bercampur. Kebanyakan estuari didominasi oleh substrat berlumpur. Substrat berlumpur ini merupakan endapan yang dibawa air tawar dan air laut. Di antara partikel yang mengendap di estuari kebanyakan bersifat organik. Akibatnya substrat ini kaya akan bahan organik, yang menjadi cadangan makanan yang besar bagi organisme estuari (Dahuri, 2001).

Ada tiga komponen fauna di estuaria yaitu fauna lautan, air tawar, dan payau atau estuari. Komponen fauna yang terbesar didominasi oleh fauna lautan, yaitu hewan stenohaline yang memiliki kemampuan toleran terbatas terhadap perubahan salinitas yaitu hanya memiliki toleransi sampai 30 ppt dan hewan eurihalin yang merupakan hewan khas laut karena memiliki kemampuan toleransi terhadap penurunan salinitas hingga 30 ppt. Komponen air payau terdiri dari spesies yang hidup di pertengahan daerah estuari pada salinitas 5 – 30 ppt. Spesies ini tidak ditemukan hidup pada perairan laut maupun tawar (Nybakken, 1988).

Adapun tujuan utama dari pola pemanfaatan sumber hayati perairan adalah merencanakan cara-cara kerja di mana manusia dapat hidup secara serasi dan selaras serta seimbang dengan lingkungan pantai. Yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah cara-cara untuk mengelola, memelihara dan mengawasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya. Dengan demikian pemanfaatan dimaksudkan agar selalu terjadi keseimbangan antara tingkat pengelolaan dan daya dukung sumberdaya. Dengan demikian pemanfaatan dimaksudkan agar selalu terjadi keseimbangan antara tingkat pengelolaan dan daya dukung sumberdaya dan selalu waspada terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya perairan harus benar-benar direncanakan dengan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan sebagai pilar utama pengelolaan yang ramah lingkungan (Dahuri, 2001).

Pengelolaan suatu sumberdaya menurut Saptarini (1995), haruslah mengacu pada strategi konservasi, yaitu : (1) Perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, dengan menjamin terpeliharanya proses ekologi bagi kelangsungan hidup biota dan ekosistemnya, (2) Pengawetan keanekaragaman sumber plasma nutfah, yaitu menjamin terpeliharanya sumber genetik dan ekosistem bagi kepentingan umat manusia dengan mengendalikan cara-cara pemanfaatannya sehingga diharapkan dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan.

5. Pengembangan Masyarakat Pantai

Strategi pengembangan masyarakat pantai dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non struktural. Pendekatan struktural adalah pendekatan makro yang menekankan pada penataan sistem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang

berwewenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir laut. Dalam hal ini peranan masyarakat sangat penting tetapi akan kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal (Satria, 2002).

Selanjutnya dikatakan oleh Satria (2002) bahwa di lain pihak pendekatan non struktural adalah pendekatan yang subyektif. Pendekatan ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara mental dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan persoalan pesisir laut. Kedua pendekatan tersebut harus saling melengkapi dan dilaksanakan secara integratif.

a. Pendekatan struktural

Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan sistem kehidupan, baik di wilayah pesisir dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan sistem hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit (Mattulada, 1997). Pendekatan struktural membutuhkan langkah-langkah strategi sebagai berikut :

1) Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat pada Sumber Daya Alam

Menurut Satria (2002) aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam adalah salah satu isu penting dalam rangka membangun perekonomian masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat menikmati peluang pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan (*sustainable*). Kesempatan tersebut selain dapat meningkatkan dan memelihara perekonomian masyarakat, juga diharapkan dapat mendorong masyarakat supaya lebih aktif untuk melindungi lingkungan, baik dengan cara pemanfaatan yang ramah lingkungan maupun upaya secara aktif untuk menjaga dari kerusakan lingkungan.

Selain itu, aksesibilitas masyarakat terhadap potensi perairan pesisir dan laut untuk transportasi dan parawisata perlu ditingkatkan. Tujuan untuk kegiatan dan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Pengembangan sektor seperti kegiatan parawisata dapat mendorong kegiatan masyarakat untuk ikut serta melindungi lingkungan terutama apabila pelaksanaannya dilakukan dengan tepat. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumberdaya alam sangat diperlukan, karena sebagian besar masyarakat pantai telah dan masih akan bergantung pada sumberdaya alam.

2) Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sumber Daya Ekonomi.

Pengembangan aksesibilitas masyarakat pantai terhadap sumber daya ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan diversifikasi sumber penghasilan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Langkah ini mencakup perluasan pilihan sumber daya ekonomi, seperti perluasan usaha dan

perkreditan. Peluang usaha selain sektor perikanan yang perlu dibuka lebih luas adalah dibidang pertanian, kerajinan, peternakan dan jasa angkutan. Hal ini penting dalam rangka membuka kesempatan masyarakat untuk tidak hanya bergantung secara langsung pada sumber daya alam, tetapi juga sekaligus mengurangi beban alam. Guna mendukung langkah tersebut, maka perlu dikembangkan aksesibilitas masyarakat terhadap perkreditan (Mattulaca, 1997).

Sistem perkreditan yang mampu memberikan pelayanan dan dorongan bagi masyarakat, sangat diperlukan. Perkreditan tersebut perlu lebih diarahkan kepada upaya pengembangan usaha yang tidak terlalu mengandalkan sumber daya alam utama di wilayah pesisir dan laut, yaitu mangrove. Karena itu, perlu dikembangkan suatu sistem perkreditan yang mampu mendorong tumbuhnya sektor usaha alternatif.

3) Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Proses Pengambilan Keputusan

Keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut sangat tergantung pada ketepatan kebijakan yang diambil. Kebijakan yang dikembangkan dengan melibatkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjamin keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan wilayah. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena akan menghasilkan kebijakan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kebijakan yang berbasis pada potensi masyarakat akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Selain itu juga memberikan keuntungan ganda: pertama, dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat maka pengelolaan pesisir dan laut akan

menarik masyarakat sehingga akan mempermudah proses penataan. Kedua, memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab atas keamanan pesisir dan laut. Selain itu yang lebih penting lagi adalah adanya upaya untuk meningkatkan kepentingan hakiki masyarakat yaitu kesejahteraan (Kusnadi, 2002).

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, dapat dilakukan dengan pendekatan yang menggabungkan *bottom up* dan *top down planning*. Pada tingkat perencanaan masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan tata ruang untuk menyerap informasi dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut akan memberikan manfaat bagi proses pengembangan zona yang akan dijadikan sebagai pola dasar penyusunan rencana pengelolaannya. Informasi dan aspirasi masyarakat tersebut juga akan bermanfaat untuk menggali potensi masyarakat terutama dalam rangka mengembangkan sistem perlindungan kawasan yang berbasis pada masyarakat. Di lain pihak, *top down planning* diperlukan untuk memberikan peluang bagi pemerintah untuk merancang pola pengelolaan wilayah bagi kepentingan yang lebih luas.

4) Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Informasi.

Informasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat pantai sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut. Ketersediaan informasi mengenai potensi dan perkembangan kondisi wilayah dan sumber daya alamnya sangat berharga untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di wilayah tersebut. Ketersediaan informasi ini juga penting bagi masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan pengembangan kegiatan dan perannya dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka. Hal tersebut juga bermanfaat untuk

mengefektifkan upaya masyarakat dalam melindungi sumber daya alam serta wilayah pesisir dan laut. Mengingat sebagian besar penduduk di wilayah ini tergantung secara ekonomis pada sumberdaya alam, maka informasi yang berkaitan dengannya sangat diperlukan bagi masyarakat (Sallatang, 1982).

Guna meningkatkan aksesibilitas informasi dari masyarakat, dapat dilakukan dengan pembentukan forum komunikasi yang melibatkan masyarakat, unsur-unsur pemerintah dan pihak terkait serta stakeholders.

5) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.

Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan wilayah dan sumber daya alam, diperlukan kelembagaan sosial untuk mendorong peranan masyarakat secara kolektif. Semangat kolektif akan mendorong upaya pemberdayaan masyarakat untuk melindungi wilayahnya dari kerusakan yang dapat mengancam perekonomian. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lembaga sosial diharapkan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menjalankan fungsi manajemen wilayah pesisir dan laut. Selain itu, pengembangan kelembagaan sosial diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kegiatan masyarakat untuk selanjutnya akan berdampak pada jalannya kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat Arifin M (2001).

Pengembangan kelembagaan dapat dilakukan dengan pembentukan embrio lembaga-lembaga sosial dalam bidang yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Apabila lembaga serupa telah ada sebelumnya, maka lembaga-lembaga tersebut perlu diberdayakan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pengembangan jaringan sosial antara lembaga-lembaga serupa baik dalam

lingkungan desa, antar desa, maupun antar kecamatan. Selain itu, pemberian peranan yang lebih kepada lembaga-lembaga tersebut dalam proyek-proyek pembangunan akan makin memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang bersangkutan.

6) Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat.

Keberadaan sistem pengawasan yang efektif merupakan syarat utama keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Sistem pengawasan tersebut harus mampu menjalankan fungsinya dengan cara memobilisasi semua unsur terkait. Salah satu pendekatan yang efektif adalah pengembangan sistem pengawasan berbasis pada masyarakat. Sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat adalah suatu sistem yang dilandasi oleh kepentingan, potensi dan peranan masyarakat lokal. Untuk itu, sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat tersebut selain memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi sumber daya alam dan wilayah tempat mereka tinggal dan mencari makan, juga memperkuat rasa kebersamaan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga sosial masyarakat pantai (Sallatang, 1982).

7) Pengembangan Jaringan Pendukung

Pengembangan koordinasi tersebut mencakup pembentukan sistem jaringan manajemen yang dapat saling membantu. Koordinasi melibatkan seluruh unsur terkait (*stakeholders*), baik jaringan pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Keberhasilan dari unsur-unsur ini, selain secara teknis manajemen akan memberikan manfaat praktis, juga secara sosial dan politis dapat mendorong

terciptanya integrasi pengelolaan pesisir dan laut. Untuk mewujudkan sistem koordinasi yang efektif, maka perlu persyaratan sistem dialog antar instansi terkait dan antara instansi-instansi tersebut dengan masyarakat. Kebiasaan mengkomunikasikan gagasan dan rencana kegiatan setiap instansi dengan instansi lain merupakan langkah strategis yang harus dikembangkan. Untuk itu, pelebagaan sistem koordinasi antar stakeholders perlu dilakukan secara terus menerus dan melibatkan langsung jajaran instansi dilingkungan pemerintah (Kusnadi, 2002).

b. Pendekatan Subyektif

Menurut Satria (2002) pendekatan subyektif (non struktural) adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumberdaya alam disekitarnya.

Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dan wilayah pesisir dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumberdaya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumberdaya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan, antara lain yaitu :

1) Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Lingkungan

Pengetahuan dan wawasan lingkungan perlu dimasyarakatkan untuk memberikan konsep dan pandangan yang sama dan benar kepada masyarakat tentang lingkungan dan peranannya terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jenis pengetahuan dan wawasan yang diberikan berbeda menurut lokasi pemukiman dan jenis pekerjaan. Bagi masyarakat yang berlokasi di zona inti tentu lebih spesifik dan lebih menekankan pada pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan hubungan langsung antara masyarakat setempat dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan pengawasannya dibanding dengan masyarakat diluar wilayah. Peningkatan pengetahuan dan wawasan juga perlu melibatkan aparaturnya dusun, desa, dan kecamatan serta masyarakat luas (Sallatang, 1982).

2) Pengembangan Keterampilan Masyarakat

Peningkatan keterampilan praktis pengelolaan lingkungan bagi masyarakat dan jajaran pemerintah ditingkat dusun, desa dan kecamatan sangat penting untuk mendorong peran serta unsur-unsur tersebut secara aktif dalam menanggulangi masalah-masalah lingkungan yang secara ekologis dan ekonomis akan merugikan. Keterampilan tersebut terutama berkaitan dengan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, dan keterampilan tentang upaya penanggulangan permasalahan. Penguasaan keterampilan tersebut akan meningkatkan efektifitas peran serta masyarakat pantai dalam pengelolaan pesisir dan laut (Mattulada, 1997).

3) Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Pengembangan kapasitas masyarakat diperlukan untuk dapat ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan, terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengembangan kapasitas masyarakat sebenarnya merupakan serangkaian kegiatan seperti yang diuraikan sebelumnya, namun dalam program ini perlu ditekankan pentingnya kemampuan dan peluang masyarakat untuk dapat mengartikulasikan kepentingannya melalui kelompok atau lembaga social (Satria, 2002). Sasaran utama program ini adalah meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dan kemampuan berinisiatif.

4) Pengembangan Kualitas Diri

Kualitas masyarakat pantai perlu ditingkatkan untuk menjawab dua tantangan. Tantangan pertama adalah, upaya mengatasi masalah perekonomian, baik untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan pokok, maupun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang lebih luas. Tantangan kedua adalah, upaya mengatasi masalah kerusakan alam, yaitu untuk mengurangi tekanan terhadap sumberdaya alam diwilayah pesisir dan laut sebagai akibat makin meningkatnya aktifitas manusia di wilayah tersebut. Pengembangan diri tersebut termasuk pengembangan kualitas manusia, baik secara perorangan maupun kelompok untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja yang kian beragam (Saptarini dkk, 1995).

Peningkatan kualitas manusia diharapkan dapat mendorong terjadinya diversifikasi lapangan kerja dan sumber penghasilan penduduk setempat sehingga mampu mengurangi kecenderungan usaha yang bertumpu pada pengelolaan sumber-daya alam yang tidak efisien. Program pengembangan kualitas manusia

ini selain dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan juga dengan cara membentuk kerjasama antar lembaga-lembaga sosial dan ekonomi, baik di lingkungan desa pantai maupun di luar, bahkan antar wilayah. Penyiapan tenaga kerja untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan laut dan wilayah lain disekitarnya perlu dilakukan secara proaktif dengan dilandasi oleh pandangan jauh ke depan.

5) Peningkatan Motivasi Masyarakat untuk berperanserta

Motivasi masyarakat perlu ditumbuhkan untuk mendorong peran serta mereka secara aktif dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Untuk itu, upaya pelibatan masyarakat dan pengembangan kegiatan yang dilandasi oleh kepentingan masyarakat perlu ditingkatkan terus. Pelaksanaannya perlu diintegrasikan dengan aspek-aspek yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Penyeimbangan kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi mempunyai arti yang strategis untuk mendorong masyarakat melibatkan diri dalam upaya perlindungan sumberdaya alam (Mattulada, 1997).

6) Penggalan dan Pengembangan Nilai Tradisional Masyarakat

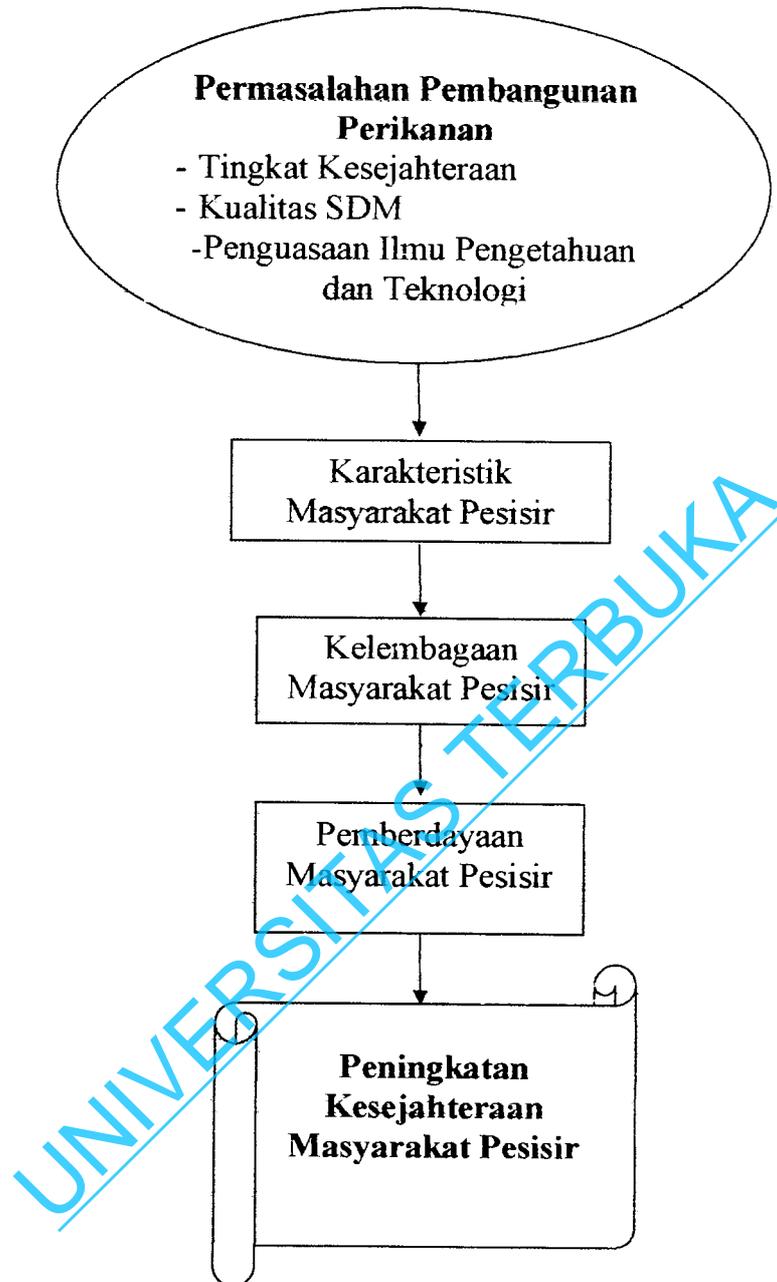
Upaya penggalan nilai-nilai tradisional adalah penting untuk dijadikan bahan pengembangan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat menjadi norma-norma yang dapat dioperasionalkan menjadi landasan dan rambu-rambu pengamanan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut.

Menurut Satria (2002) pengembangan nilai-nilai dan norma-norma arif lingkungan masyarakat akan mendorong penggunaan aturan-aturan atau cara-cara mereka sendiri dalam mengelola sumberdaya alam berdasarkan pada nilai-nilai

yang mereka yakini. Dengan demikian, strategi pengembangan masyarakat pantai dalam meningkatkan kemandirian daerah, sesungguhnya dapat dibagi dua yaitu, pertama merupakan strategi jangka pendek yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah pengembangan masyarakat pantai dengan menyesuaikan urgensi kebutuhan melalui pendekatan struktural dan non struktural. Kedua adalah strategi jangka panjang dengan tujuan yang menitikberatkan pada :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
2. Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan, pemanfaatan secara optimal dan lestari sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan.
3. Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan.
4. Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan.

Keempat tujuan jangka panjang tersebut hanya mungkin dicapai bila disusun dan ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan kawasan pesisir dan laut secara mantap dan berkesinambungan.

B. Kerangka Pikir

Gambar 2.1. Kerangka Pikir

C. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi penelitian, maka ditetapkan konsep operasional sebagai berikut :

1. **Masyarakat Pesisir Tomalou Tidore** adalah kelompok masyarakat yang tinggal dan menetap di pesisir pantai Tomalou Kota Tidore.
2. **Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Nelayan** adalah peningkatan kemampuan anggota masyarakat nelayan untuk ikut serta dalam suatu kelompok masyarakat dalam pengelolaan dan persoalan pesisir laut untuk meningkatkan taraf hidupnya.
3. **Kelompok Usaha Bersama (KUB)** adalah suatu kelompok usaha yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh kepentingan, kebutuhan, dan keinginan bersama disertai rasa tanggungjawab bersama, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota.
4. **Pengelolaan Wilayah Pesisir** adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya pesisir dengan mempertahankan kelestariannya.
5. **Karakteristik Kelompok Nelayan** adalah ciri-ciri khusus atau sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu terhadap masyarakat nelayan yang tergabung dalam suatu kelompok.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2009 di Kelurahan Tomalou Kota Tidore.



Lokasi Penelitian

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian

B. Populasi dan Sampel

Penentuan populasi penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive*) yaitu masyarakat pesisir Kelurahan Tomalou Kota Tidore Provinsi Maluku Utara. Jumlah populasi yaitu 783 kk, selanjutnya ditetapkan kriteria sampel yang didasarkan atas keikutsertaan mereka dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Tomalou Kota Tidore yaitu 391 kk, sehingga ditetapkan sampel sebesar 39 orang. Ukuran sampel responden ditentukan berdasarkan pendapat Usman dan Akbar (1998), yaitu berpedoman pada prinsip keterwakilan, maka persentase contoh ditetapkan sekurang-kurangnya 10 % dari populasi nelayan.

C. Instrumen Penelitian

1. Pedoman wawancara, digunakan sebagai acuan dalam melakukan wawancara dengan nelayan.
2. Alat tulis, digunakan untuk mencatat hasil wawancara dengan nelayan.
3. Kamera, digunakan untuk dokumentasi.
4. Komputer, yang digunakan yaitu *Microsoft Windows XP Intel Pentium IV, Processor 450 MHZ, 128 MB of RAM*. Alat ini digunakan untuk menganalisis data dan membuat laporan akhir penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode survei terhadap objek nelayan sebagai pelaku. Informasi dari nelayan dilengkapi dengan instrumen berupa daftar pertanyaan sehingga informasi yang diperoleh lebih terarah pada inti permasalahan. Data teknis alat tangkap dilakukan melalui wawancara dengan nelayan pemilik (kelompok nelayan usaha bersama) di

Kelurahan Tomalou Kota Tidore. Data menyangkut rantai produksi perikanan, kelembagaan serta informasi lainnya yang berkaitan dengan usaha perikanan tangkap diperoleh dari instansi yang terkait. Selain itu juga dilakukan teknik dokumentasi untuk memperlihatkan dengan gambar kondisi daerah penelitian.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian dilakukan pendekatan studi bertahap. Tahap pertama, menganalisis deskripsi lembaga sosial kelompok nelayan Tomalou dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut, faktor-faktor yang dilihat dan kemudian dievaluasi adalah peranan dan fungsi kelembagaan (pemilik usaha perikanan tangkap dan koperasi nelayan) yang berhubungan dengan usaha perikanan yang ada di Kelurahan Tomalou, kemudian dievaluasi kinerja dari usaha perikanan tersebut; Tahap kedua menganalisis ciri ekonomi masyarakat nelayan Tomalou Kota Tidore sebagai wadah dalam memanfaatkan sumberdaya wilayah perikanan. Tahap ini yang dievaluasi adalah sistem bagi hasil, distribusi pendapatan di kelompok nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir; dan Tahap ketiga merumuskan model pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mengelola sumberdaya perikanan laut guna peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dalam merumuskan model pemberdayaan ini maka dilakukan analisis *SWOT*.

1. Menganalisis deskripsi lembaga sosial kelompok nelayan Tomalou dalam pengelolaan wilayah perikanan tangkap

Untuk menganalisis deskripsi lembaga sosial kelompok nelayan Tomalou dalam pengelolaan wilayah perikanan tangkap, maka dilakukan analisis kelembagaan. Analisis kelembagaan dilakukan untuk melihat sejauh mana hubungan kerja antara kelembagaan dengan pengembangan usaha perikanan di

Tomalou. Analisis ini dilakukan secara deskriptif yaitu dengan mempelajari karakteristik kelembagaan perikanan khususnya lembaga sosial kelompok nelayan yang ada di Kota Tidore dan Provinsi Maluku Utara. Fakta yang ada selanjutnya dilakukan interpretasi mengenai keberadaan lembaga di tengah masyarakat, kemudian dikemukakan beberapa alternatif pemecahan yang memungkinkan, terutama berkenaan dengan pengaruh kelembagaan terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir di Tomalou.

2. Menganalisis ciri ekonomi masyarakat nelayan Tomalou Kota Tidore sebagai wadah dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan laut

Untuk menganalisis menganalisis ciri-ciri ekonomi masyarakat nelayan Tomalou Kota Tidore sebagai wadah dalam memanfaatkan sumberdaya wilayah perikanan laut, maka dilakukan analisis system bagi hasil, analisis penerapan sistem bagi hasil yang berlaku di kelompok nelayan, serta distribusi pendapatan dalam kelompok nelayan.

3. Merumuskan strategi kelompok masyarakat nelayan dalam mengelola sumberdaya perikanan laut guna peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Merumuskan strategi masyarakat nelayan dalam mengelola sumberdaya perikanan laut guna peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dalam merumuskan strategi ini maka dilakukan analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)* dengan menggunakan matriks SWOT (Tabel 3.1). Arahan strategi ini menggunakan Analisis SWOT (Rangkuti, 2001).

Tabel 3.1 Matriks Analisis SWOT (Rangkuti, 2001)

IFAS (Internal Faktor Analysis Strategy)	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	EFAS (External Factor Analysis Strategy)	Kekuatan Internal 1 2 3 4
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI (S-O)	STRATEGI (W-O)
Peluang Eksternal 1 2 3 4	Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS (T)	STRATEGI (S-T)	STRATEGI (W-T)
Ancaman Eksternal 1 2 3 4	Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

Dalam analisis tersebut akan tercipta empat strategi yaitu strategi S-O, W-O, S-T, dan W-T. Keempat strategi ini diciptakan dengan memperhatikan titik singgung unsur-unsur dari satu faktor dengan faktor lainnya

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Fisik Wilayah

Kelurahan Tomolou adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore, Propinsi Maluku Utara. Letak Kelurahan Tomalou yaitu pada pantai barat agak ke utara ibukota Kecamatan Tidore Selatan, 7 km sebelah utara Kota Tidore Propinsi Maluku Utara dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan Kelurahan Gurabati, Sebelah Timur dengan Gunung Tidore, Sebelah Selatan dengan Kelurahan Tuguiha dan Sebelah Barat dengan Laut Mare.

Sedangkan pembagian administrasi dan luas wilayah Kelurahan Tomalou yang luasnya 4,67 Ha, terdiri dari 5 lingkungan 9 rukun tetangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW) yang rincianya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Pembagian Daerah Administrasi dan Luas Wilayah Kelurahan Tomalou

No.	Lingkungan	Jumlah RT	Luas (Ha)
1	Satu	2	1,03
2	Dua	2	1,06
3	Tiga	1	0,52
4	Empat	2	1,05
5	Lima	2	1,02
	Jumlah	9	4,67

Sumber : Kantor Kelurahan Tomalou, 2009

Kelurahan Tomalou beriklim tipe C (menurut klassifikasi Schmidt Fergusson). Curah hujan rata-rata 2702 mm pertahun dengan jumlah hari hujan 92,4 hari. Musim hujan mulai pada bulan November dan berakhir pada

bulan Mei. puncak musim hujan jatuh pada bulan-bulan Desember, Januari dan Februari. Musim kemarau mulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Oktober yang puncaknya jatuh pada bulan-bulan Agustus dan September.

Kelurahan Tomalou dipengaruhi oleh dua macam angin yaitu: angin Musim Barat yang basah dan berkekuatan lemah, kecuali yang bertiup dari barat daya, dan angin musim timur yang bersifat kering. Angin inilah yang berpengaruh pada Kelurahan Tomalou. Kecepatan angin rata-rata 3,15 Knots. Kecepatan angin maksimum terjadi umumnya pada bulan November sampai bulan Februari, pada bulan-bulan tersebut curah hujan mencapai puncaknya. Suhu rata-rata 27,25 °C, suhu maksimum dapat mencapai 34 °C dan suhu minimum dapat mencapai 14,70 °C. Suhu yang panas biasanya terjadi pada bulan Oktober, sedang suhu yang dingin terjadi pada bulan Desember. Kelembaban udara rata-rata 71,27 % dengan intensitas penyinaran 70,15 %.

Tinggi dari permukaan laut berkisar antara 0 – 2 m dengan topografi atau kemiringan rendah. Rumah-rumah sebagian besar semi permanen dan hampir seluruhnya beratap seng. Pantai berpasir dan pada pinggir pantai banyak terdapat batu-batu gunung yang terseret oleh riak ombak laut. Rincian keadaan rumah penduduk dapat kita lihat pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Keadaan Rumah Penduduk di Kelurahan Tomalou

No.	Keadaan Rumah	Jumlah
1	Permanen	230
2	Semi Permanen	339
3	Darurat	1

Sumber : Kantor Kelurahan Tomalou, 2009

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Kelurahan Tomalou pada tahun 2008 berjumlah 3138 jiwa. Jumlah wanita 1623 jiwa lebih banyak dari jumlah pria 1515 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut sebagian besar bermukim di lingkungan 4, namun di lingkungan itulah yang merupakan lingkungan yang lebih padat penduduknya. Secara rinci keadaan penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.3 :

Tabel 4.3 Penduduk Kelurahan Tomalou pada Tiap Lingkungan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Lingkungan	Pria	Wanita	Jumlah	Kepala Keluarga
1	Satu	400	410	810	183
2	Dua	353	330	683	154
3	Tiga	153	158	311	101
4	Empat	390	400	790	177
5	Lima	219	325	544	168
		1515	1623	3138	783

Sumber : Kantor Kelurahan Tomalou, 2009

Sebagian besar penduduk bergantung hidup pada sektor perikanan, dengan komoditi ikan. Dari jumlah penduduk yang sangat tergantung pada sektor perikanan ini sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Tomalou

No	Mata Pencaharian	Jumlah Kepala keluarga	Persentase (%)
1	Nelayan	391	49,94
2	Petani	29	3,7
3	Pegawai Negeri	145	18,52
4	TNI/POLRI	11	1,4
5	Wiraswasta/Pedagang	207	26,44
	Jumlah	783	100

Sumber : Kantor Kelurahan Tomalou, 2009

Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Tomalou sudah mulai meningkat karena hampir sebagian besar tamat di pendidikan SLTP dan bahkan ada beberapa orang yang telah tamat di perguruan tinggi. Secara rinci keadaan pendidikan penduduk Tomolou dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Tomalou

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	65	2,07
2	Belum Sekolah	356	11,35
3	Taman Kanak-kanak	403	12,84
4	Tamat SD	525	16,73
5	Tamat SLTP	319	10,17
6	Tamat SLTA	998	31,8
7	Tamat Sarjana Muda	117	5,64
8	Tamat Perguruan Tinggi	295	9,4
	Jumlah	3138	100

Sumber : Kantor Kelurahan Tomalou, 2009

Tabel 4.6 Jenis dan Jumlah Fasilitas dan Pusat Pelayanan

No	Jenis	Jumlah	Tempat (Lingkungan)
1	Kantor kelurahan	1	Dusun Dua
2	Pasar	1	Dusun Empat
3	Balai Pertemuan Masy.	1	Dusun Dua
4	Posyandu	-	
5	Sekolah		
	- Play Group	1	Dusun Satu
	- TK	1	Dusun Tiga
	- SD	2	Dusun Empat
	- SMP	1	Dusun Dua
	- SMA	1	Dusun Dua
	- Perguruan Tinggi	-	-
6	Masjid	2	Empat
7	Mushalla	1	Dusun Tiga
8	Warung, kios	32	Semua Dusun
9	TPI	1	Dusun Tiga
10	KUD	1	Dusun Tiga

Sumber : Kantor Kelurahan Tomalou, 2009

Unit penangkapan ikan pada dasarnya terdiri dari alat transpor dan alat tangkap. Alat transpor yang ada pada unit penangkapan ikan di Kelurahan Tomalou adalah perahu motor, sampan, perahu layar (perahu tanpa motor), dan kapal kayu/fiber glass yang digunakan untuk menangkap ikan dengan jangkauan yang lebih jauh dari lokasi pendaratan.

Sebagian dari nelayan Kelurahan Tomolou ini nampaknya cocok dengan cara penangkapan ikan yang lebih bersifat berburu apabila musim paceklik (atau musim kurang ikan) di daerahnya, mereka akan mencari ikan menuju ke daerah lain seperti ke Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di (pulau Bacan dan pulau Obi), Kabupaten Sula (Mangoli) serta Kabupaten Halmahera utara (Morotai). Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan alat transpor yang lebih cocok untuk perjalanan jauh. Karena itu jugalah sehingga

kapal kayu yang jangkauan operasinya cukup jauh dari tahun ke tahun semakin bertambah. Secara lebih rinci dapat kita lihat perkembangan jumlah armada penangkapan ikan di Kelurahan Tomolou pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Perkembangan Jumlah Armada Penangkapan Ikan di Kelurahan Tomolou

No	Jenis Armada Penangkapan	2003	2004
1	Perahu tanpa Motor	82	117
2	Perahu motor tempel	24	34
3	Kapal Motor (5 – 20 GT)	7	16

Sumber : Kantor Kelurahan Tomolou dan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore, 2004

Kapal-kapal kayu yang bermesin hampir semuanya bermerk Yanmar dengan kekuatan 7 PK dan maksimum 270 PK.

3. Keragaan Perikanan Tangkap Kota Tidore kepulauan

Perikanan tangkap merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang menjadi salah satu *prime mover* di kota Tidore Kepulauan karena kontribusinya cukup besar, yaitu 8291,8 ton/tahun atau 88,33 % dibandingkan perikanan budidaya dan pengolahan. Kegiatan perikanan tangkap menghasilkan berbagai jenis hasil tangkapan berupa ikan konsumsi bernilai ekonomis penting diantaranya ikan pelagis besar seperti cakalang (*Katsuwonus pelamis*), tuna (*Thunnus spp*), tongkol (*Euthynnus spp*), dan jenis-jenis ikan pelagis kecil seperti kembung (*Rastralliger*), layang (*Decapterus*), tembang (*Sardinella spp*), selar (*Selaroides spp*) dan beberapa jenis ikan pelagis ekonomis lainnya yang ditangkap oleh masyarakat nelayan di sekitar perairan pantai. Beberapa jenis ikan demersal yang diusahakan oleh masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan antara lain kerapu (*Epinephelus spp*), lolosi (*Caesio spp*),

beronang (*Siganus spp*), kakatua (*Scarus spp*), kakap (*Lates spp*), serta jenis-jenis lainnya yang belum dikomersialkan dan masih terbatas pada konsumsi masyarakat (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan, 2007).

Selanjutnya dikatakan bahwa hasil identifikasi jenis-jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan di sekitar perairan pantai terdapat sekitar 98 jenis ikan, 74 diantaranya bernilai ekonomis penting, 20 jenis telah dikomersialkan termasuk didalamnya cumi-cumi (*Loligo sp*), udang lobster, penaeid, ikan teri (*Stelephorus spp*) dan nener estuary, serta 12 jenis ikan hias ekonomis penting.

Usaha perikanan tangkap yang dikelola di Kota Tidore Kepulauan terdiri dari berbagai jenis jaring dan pancing. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore bahwa usaha perikanan tangkap yang dominan melibatkan para nelayan yaitu *pole and line* (pancing huhate), pancing tonda, pancing ulur, pukot cincin/soma giop, jaring insang tetap, pukot, bagan perahu/bagan tancap. Usaha perikanan tangkap ini tersebar pada Kecamatan Tidore utara, Tidore Selatan, Tidore, Oba Utara dan Oba, dengan jumlah yang bervariasi. Armada penangkapan *pole and line* terdapat disemua kecamatan, tetapi paling banyak di temukan di kecamatan Tidore Selatan tepatnya di kelurahan Tomolou sebanyak 96 unit.

B. Deskripsi Lembaga Sosial Kelompok Nelayan *Pole and Line* Kelurahan Tomolou

Nelayan Kelurahan Tomolou setiap tahunnya pada musim-musim paceklik dimana tidak ada ikan mereka melakukan perjalanan menuju ke Kabupaten Halmahera Selatan atau ke Halmahera Utara untuk melakukan operasi penangkapan ikan, dan kembali lagi sekitar 4 – 5 hari ke daerah mereka setelah operasi penangkapan selesai.

Nelayan-nelayan di desa Tomolou telah terorganisasi dalam kelompok-kelompok fungsional, yang dikendalikan oleh Pemilik Kapal. Hubungan kerja antara pemilik kapal dengan anak buah kapal itulah membentuk sistem sosial nelayan. Karena itu pemilik kapal mempunyai kedudukan terpandang, karena peranan pemilik kapal adalah pemimpin usaha kegiatan penangkapan ikan. Peralatan kerja milik pemilik kapal seperti pancing (*pole and line*), pukat, dan lain-lain dioperasikan oleh sejumlah nelayan yang disebut anak buah kapal. Anak buah kapal adalah pengikut dari seorang pemilik kapal, keseluruhan mereka menjadi kelompok fungsional, yang mempunyai kesadaran kelompok yang cukup kuat. Dalam keanggotaannya kelompok nelayan tersebut umumnya di bawah manajemen keluarga.

Hubungan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal bersifat fungsional, maksudnya adalah aktivitas khusus yang dilakukan secara teratur dan memenuhi satu atau lebih kebutuhan pokok. Dari segi ini pemilik kapal umumnya berperan sebagai pemilik alat, dan anak buah kapal sebagai penggarap.

Operasi penangkapan ikan dipimpin oleh pemimpin yang disebut juragan. Juragan ini adalah seorang anak buah kapal yang berpengalaman dan

bertanggung jawab dalam operasi penangkapan ikan. Hubungan kerja antara pemilik kapal dan anak buah kapal di dalam kelompok nelayan ini bersifat tidak tetap karena sebenarnya anak buah kapal adalah orang bebas, yang hanya ikut operasi penangkapan selama satu musim penangkapan. Tetapi pada kenyataannya hubungan kerja antara pemilik kapal dan anak buah kapal cenderung bersifat tetap karena karena berbagai faktor yang mendorong terjadinya keadaan seperti itu.

Transaksi utang piutang yang dilakukan oleh anak buah kapal ke pemilik kapal kadang menjadi salah satu faktor yang menjadi hubungan yang tetap. Jika hal ini terjadi, anak buah kapal harus terus bekerja ke pemilik kapal untuk melunasi hutangnya. Keadaan ini bisa berlangsung lama, karena hasil yang diperoleh bersifat tidak tetap. Hubungan yang tetap antara pemilik kapal dengan anak buah kapal juga bisa terjadi ketika anak buah kapal yang diangkat menjadi anak buah kapal adalah kerabat atau anggota keluarga pemilik kapal, hal ini mengakibatkan terjadi ikatan emosional. Anak buah kapal seperti ini diistilahkan anak buah kapal tetap karena dalam kondisi apapun anak buah kapal ini tidak akan meninggalkan pemilik kapalnya.

Kelompok nelayan di Desa Tomalou adalah kelompok nelayan yang melakukan usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap Pole and Line. Adapun gambar kapal penangkapan ikan dan alat penangkapan yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut



Gambar 4.1 Gambar Kapal penangkapan ikan *Pole and Line* Nelayan Kelurahan Tomolou

Menurut hasil wawancara dengan beberapa pemilik kapal setempat bahwa dibutuhkan modal Rp. 800 juta untuk pengadaan satu unit usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap pole and line dengan kapal yang berukuran 20 GT 230 PK. Di Lokasi penelitian ini kelompok nelayan tersebut memiliki anggota 16 orang terdiri dari 1 pemilik kapal dan 15 orang anak buah kapal yang terdiri dari 1 anak buah kapal sebagai juragan (juru keker atau pengarah kapal), 1 anak buah kapal sebagai juru mesin, 1 orang anak buah kapal sebagai pelempar umpan yang diistilahkan boy-boy di daerah setempat dan 12 anak buah kapal lainnya sebagai bagian memancing. Kesemua anggota dalam kelompok nelayan tersebut mempunyai peran dan fungsi dalam operasi penangkapan disajikan dalam Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8. Peran dan Fungsi Anggota Kelompok Nelayan *Pole & Line* Tomolou

No	Peran	Fungsi
1	Pemilik Kapal	Sebagai pemilik modal dan alat tangkap dan bertanggungjawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan kepentingan usaha penangkapan.
2	ABK Juragan	Sebagai pemimpin operasi penangkapan dan bertanggungjawab terhadap keselamatan anak buah kapal, kapal dan alat penangkapan selama operasi penangkapan dan juga bertindak sebagai juru mudi dan orang yang menentukan lokasi penangkapan ikan.
3	ABK Mesin	Bertanggungjawab terhadap mesin kapal selama operasi penangkapan.
4	ABK Boy-boy	Sebagai pelempar umpan dan juga ikut memancing ikan
5	ABK Biasa	Sebagai pemancing ikan dan juga bertugas membantu juragan selama operasi penangkapan.

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2009.

Kelompok nelayan *Pole and Line* Kelurahan Tomolou secara struktur keanggotaan menunjukkan bahwa pemilik kapal sebagai pemimpin memiliki pengikut yaitu para anak buah kapal yang terdiri dari juru mesin, boy-boy dan anak buah kapal biasa. Kedudukan seorang pemilik kapal dapat dilihat dari segi banyaknya pengikut yang menyertainya. Dalam hal ini, jumlah pengikut harus pula diimbangi oleh jumlah alat tangkap yang tersedia dan dimiliki oleh pemilik kapal.

Anak buah kapal umumnya diperlakukan oleh pemilik kapal sebaik-baiknya agar mereka tidak berpindah pada pemilik kapal yang lain, karena jika ini terjadi akan membuat malu pemilik kapal dan nama baiknya akan tercemar. Di lain pihak pada saat sekarang ini susah untuk mencari anak buah kapal karena para pemuda lebih condong untuk mencari pekerjaan lain yang pendapatannya teratur dan ini ditunjang dengan keadaan lokasi yang dekat dengan kota Tidore dan ditunjang dengan fasilitas transportasi yang lancar.

Menurut Satria (2002) aksesibilitas masyarakat terhadap potensi perairan pesisir dan laut untuk transportasi dan pariwisata perlu ditingkatkan. Tujuannya untuk kegiatan dan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Untuk kasus pemuda yang berdiam di pesisir desa Tomolou dengan keterbatasan aksesibilitas terhadap potensi perairan pesisir dan laut khususnya dengan keadaan transportasi yang lebih menunjang dan lancar sehingga pada umumnya mereka lebih tertarik untuk mencari pekerjaan diluar selain menjadi nelayan di desanya.

Adapun pengangkatan anak buah kapal sebagai juragan, pada umumnya dilakukan berdasarkan keterampilan khusus dan dianggap cakap untuk

menempati jabatan tersebut. Untuk pengangkatan anak buah kapal biasa berdasarkan hasil pengamatan dan pantauan dari juragan yang dikonsultasikan kepada pemilik kapal, atau anak buah kapal yang telah memiliki pengalaman sebelumnya dalam menangani bagian tersebut dari pemilik kapal yang lain. Kasus seperti ini juga terjadi di desa nelayan Dufa-dufa Ternate menurut hasil penelitian Syahrir (2005) bahwa pengangkatan anak buah kapal menjadi juragan berdasarkan hasil pengamatan dan pantauan dari juragan yang dikonsultasikan kepada pemilik kapal, atau anak buah kapal yang telah memiliki pengalaman sebelumnya dalam menangani bagian tersebut dari pemilik kapal yang lain.

Secara struktur keanggotaan kelompok nelayan pole and line kelurahan Tomolou dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

- Garis perintah
- - - - -> Garis koordinasi

Gambar 4.2 Struktur Keanggotaan Kelompok Nelayan Pole and Line Kelurahan Tomolou

1) Beberapa Hal yang mempengaruhi pemilihan lokasi penangkapan ke Kabupaten Halmahera Selatan atau ke Kabupaten Halmahera Utara (Morotai), Kabupaten Sula (Mangoli)

Adapun yang mendorong terjadinya pemilihan daerah penangkapan ke kabupaten lain (Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di pulau Bacan dan pulau Obi, Kabupaten Sula tepatnya di Mangoli serta Kabupaten Halmahera Utara tepatnya di Morotai) oleh nelayan adalah faktor pendorong yaitu faktor-faktor yang bersumber dari daerah asal dan faktor penarik yaitu faktor yang terdapat di daerah tujuan. Disamping kedua faktor di atas, masih ada faktor lain yang tidak dapat digolongkan kedalam keduanya. Oleh karena itu disebut faktor-faktor lain (*others factors*). Yang termasuk faktor-faktor lain adalah faktor pribadi dan perubahan teknologi.

Menurut Kusnadi (2002) pada dasarnya terdapat dua pola migrasi (berpindah tempat) yang kita kenal di Indonesia, yaitu pindah dan merantau. Yang pertama diartikan adalah berpindah tempat tinggal untuk selamanya sementara yang kedua adalah berpindah sementara untuk kebutuhan mencari kerja atau usaha dagang. Hasil penelitian yang disebutkan di atas adalah menunjukkan pola migrasi kedua yaitu berpindah ke lokasi penangkapan yang lain di luar daerah mereka untuk sementara waktu dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan di daerah yang lebih menjanjikan.

a. Faktor Pendorong

Faktor-faktor penunjang yang terdapat di daerah asal adalah :

1) Lokasi Penangkapan

Kota Tidore dengan memiliki berbagai komponen alam yaitu Laut, Pulau, Danau, Gunung, menggambarkan ciri topografis yang

bervariasi yang didominasi oleh dataran kemiringan diatas 40 derajat dan kemiringan rendah terletak linear memanjang mengikuti beberapa pesisir pantai pada posisi 0-2 derajat. Pesisir pantai Tidore umumnya merupakan perairan dangkal, kemudian dasar lautnya terjal, di tempat inilah berakumulasi nelayan Maluku Utara, termasuk nelayan dari Kelurahan Tomolou Tidore.

2) Hubungan Musim Penangkapan

Pada bulan Maret-Mei dimana merupakan puncak musim penghujan, hujan yang keras dan angin keras yang menyebabkan gelombang besar sehingga aktifitas penangkapan berkurang.

3) Paceklik

Bulan November-Maret merupakan bulan-bulan paceklik bagi nelayan yang beraktifitas menangkap ikan. Pada saat yang bersamaan harga kebutuhan hidup meningkat dan semakin mahal. Pada saat itu mereka akan berangkat untuk mencari ikan ke Kabupaten Lain.

4) Lahan Pertanian

Lahan pertanian di Kelurahan Tomolou tergolong sangat sempit. Dari 3138 jiwa penduduk yang terdiri dari 783 kepala keluarga di Kelurahan Tomolou yang bekerja disektor pertanian hanya 29 kepala keluarga. Luas lahan pertanian sempit dan penambahan penduduk yang semakin meningkat sehingga luas lahan pertanian sangat tidak mendukung mata pencaharian bagi penduduk setempat.

5) Lapangan Kerja

Lapangan kerja yang tersedia bagi penduduk Kelurahan Tomolou mayoritas adalah sebagai nelayan dimana kondisi perairan setempat yang sangat luas yang didukung potensi sumberdaya hayati perairan yang kaya dan masih alami.

Sebagian kecil penduduk setempat berprofesi sebagai petani, pedagang kecil dan beberapa orang berstatus sebagai pegawai negeri. Pada umumnya nelayan tidak memiliki lahan pertanian sehingga mata pencaharian mereka hanya sebagai nelayan.

b. Faktor Penarik

Kesempatan mencari hasil tangkapan di tempat lain yang lebih menjanjikan adalah faktor penarik utama bagi nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan ke Kabupaten lain. Hal ini sesuai dengan teori L. A. Sjaastad dalam Kusnadi 2002 bahwa salah satu teori migrasi adalah model *human capital* didasarkan atas teori pembuatan keputusan individual yang menekankan aspek investasi dalam rangka meningkatkan produktivitas manusia. Dalam model ini, niat tersebut lebih ditentukan oleh mencari kesempatan dalam hal ini kesempatan memperoleh hasil tangkapan ikan yang lebih baik dan perolehan pendapatan yang lebih tinggi. Faktor-faktor penunjang yang terdapat pada daerah tujuan adalah :

1) Lokasi Penangkapan

Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di pulau Bacan dan pulau Obi, Kabupaten Sula tepatnya di Mangoli serta Kabupaten Halmahera utara tepatnya di Morotai merupakan perairan dangkal yang luas dan

ideal untuk penangkapan ikan. Menurut nelayan daerah penangkapan di daerah ini sangat kaya akan jenis-jenis ikan.

a) Perizinan

Di Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di pulau Bacan dan pulau Obi, Kabupaten Sula tepatnya di Mangoli serta Kabupaten Halmahera utara tepatnya di Morotai sangat mudah mendapat izin. Pada waktu kesana nelayan hanya membutuhkan izin dari kelurahan mereka kemudian disyahkan di syahbandar dengan prosedur yang tidak berbelit-belit. Secara teori hal ini lebih mempermudah bagi kelompok nelayan untuk melakukan penangkapan ikan pada daerah lain.

b) Pelaksanaan Operasi Penangkapan Ikan

Setibanya di lokasi penangkapan, nelayan kelurahan Tomalou langsung melakukan operasi penangkapan ikan karena mereka telah mensahkan izin penangkapan dari syahbandar dan cukup melapor diri pada pihak yang berwajib (Babinsa), sementara izin penangkapan diurus dengan membayar Rp.100.000 (tahun 2004) pada dinas perikanan setempat, selain izin penangkapan ini pengurusan surat-surat yang lainnya tidak dikenakan biaya.

c. Faktor-Faktor Lain

Fenomena yang dijumpai di pesisir adalah dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat mengakibatkan akses pemanfaatan sumberdaya khususnya sumberdaya perikanan semakin terdesak selain faktor tersebut faktor teknologi juga ikut andil didalamnya (Arifin T., 2002). Fenomena

tersebut juga terjadi di daerah penelitian. Adapun faktor-faktor lain yang dijumpai di daerah penelitian yaitu :

1) Teknologi

Perkembangan motorisasi sangat cepat, jumlah dan jenis alat tangkap semakin bertambah dan waktu penangkapan yang lebih lama dan intensif, diikuti oleh penambahan jumlah nelayan yang sangat pesat, kesemuanya ini akan mempercepat terkurasnya ikan di daerah penangkapan di perairan Tidore. Dengan tersedianya perahu motor yang dapat ditumpangi oleh mobilitas nelayan ke daerah lain lebih mudah, murah dan aman.

2) Keadaan Sosial Ekonomi Nelayan

Karena pendidikan formal nelayan yang relatif rendah (maksimum tamat SMP), nelayan Kelurahan Tomalou tidak memiliki keterampilan lain, sehingga pekerjaannya hanya sebatas nelayan. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki areal pertanian dan tanggungan relatif tinggi sekitar 5- 10 orang. Mencari ikan ke daerah lain adalah salah satu alternatif yang dimiliki nelayan setempat untuk mencari penghasilan yang lebih baik, selain itu pemuda setempat juga memanfaatkan fasilitas tersebut untuk berjalan-jalan di kabupaten lain sekaligus mencari pengalaman di tempat selain dari tempat tinggalnya.

3) Proses Operasional usaha penangkapan Ikan menuju ke Kabupaten Halmahera Selatan

Sebagai langkah awal melakukan proses operasional usaha penangkapan ikan ke Kabupaten lain adalah melakukan persiapan. Persoalan mendasar yang dihadapi oleh nelayan untuk melakukan

operasional penangkapan ikan di daerah lain adalah masalah biaya operasional, hal ini juga terjadi umumnya di desa nelayan Indonesia. Keterbatasan biaya tersebut juga yang merupakan faktor terganggunya nelayan dalam suatu kelompok untuk melakukan usaha penangkapan secara bersama dan saling mendukung (Kusnadi, 2002).

a. Persiapan

Penangkapan ikan ke Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya di pulau Bacan dan pulau Obi, Kabupaten Sula tepatnya di Mangoli serta Kabupaten Halmahera utara tepatnya di Morotai dilakukan pada bulan Nopember dan sebelum pemberangkatan ini terlihat kesibukan-kesibukan disebabkan karena keperluan yang harus dipersiapkan yaitu: uang tunai dan beberapa kebutuhan lainnya selama melakukan perjalanan.

1) Mencari dan Menentukan Anak Buah Kapal

Dalam kelembagaan sosial kelompok nelayan menjadi keharusan bagi pihak pemilik kapal untuk berusaha mencari dan mengangkat anak buah kapal sebagai juragan yang sudah memiliki keterampilan dalam melakukan suatu koordinasi usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap *pole and line*. Dalam kajian penelitian ini pihak pemilik kapal mengangkat menantunya atau keluarga dekatnya menjadi anak buah kapal juragan yang sudah lama dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya pemilik kapal akan mempercayakan kepada juragan tersebut untuk mengangkat anak buah kapal yang lain sebagai anggotanya. Biasanya juragan mengangkat anak buah kapal dari hubungan keluarga atau tetangga dekatnya atau dari desa lain yang telah dikenal sebelumnya.

2) Perbaikan dan Pemeliharaan Alat

Pemeliharaan pada kapal biasanya terdiri dari penggantian bagian-bagian yang rusak, menambal yang bocor, dan pengecatan kemudian pemeliharaan pada mesin kapal juga pekerjaan-pekerjaan lain seperti memperbaiki alat tangkap dilakukan sendiri oleh pemilik kapal dan anak buah kapal. Sedangkan untuk pengelasan dan penggantian bagian kapal yang rusak biasanya dilakukan di bengkel.

3) Menyiapkan Bekal

Bekal disini adalah bahan makanan, alat atau uang dan sebagainya yang akan dibutuhkan selama dalam perjalanan dan beberapa hari setibanya di daerah migrasi. Bekal utama adalah solar untuk bahan baku mesin, beras dan air tawar, sedangkan yang lainnya seperti sagu, kopi, gula, garam, lauk pauk dan sebagainya hanya sekedar dibutuhkan dalam perjalanan.

4) Surat-surat

Salah satu surat yang harus dipersiapkan sebelum pemberangkatan adalah surat keterangan dari kantor kelurahan, yang berfungsi sebagai surat keterangan bepergian (pas jalan). Karena pemberangkatannya menggunakan perahu motor dan penumpangnya minimal 10 orang, selain surat dari kelurahan setempat mereka juga membawa surat izin berlayar yang di keluarkan oleh syahbandar namun keterangan izin berlayar ini biasanya tidak terlalu dipersoalkan oleh pemilik kapal karena setibanya dilokasi tujuan yang dimana disana hanya

berupa izin dari kelurahan nanti setibanya ditempat tujuan izin dari kelurahan tersebut disahkan oleh syahbandar setempat.

5) Selamatan

Persiapan terakhir sebelum berangkat adalah selamatan. Acara selamatan dilaksanakan pada perahu yang akan digunakan ke daerah tujuan yang sekaligus perahu tersebut akan dipakai dalam operasi penangkapan ikan. Acara ini diawali dengan permohonan doa. Peserta upacara diutamakan bagi mereka yang dituakan dan anggotanya semua pria. Dengan duduk bersila semua peserta upacara mengelilingi makanan berupa nasi kuning yang dibuat menyerupai tumpeng-tumpeng kecil yang di atasnya diberi telur masak, tidak ketinggalan penganan sagu kering, pisang goreng, teh manis beserta kopi.

Tujuan upacara ini dimaksudkan agar semua awak kapal selamat dalam perjalanan dan kembali ke daerah asal. Selain itu juga sebagai permohonan doa agar mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dan rezeki yang halal. Sesudah upacara selamatan mereka akan bertukar pikiran tentang waktu yang tepat, siapa yang berangkat dan hal-hal yang dibutuhkan pada saat melakukan pemberangkatan.

b. Waktu Pemberangkatan

Para nelayan mempunyai kepercayaan bahwa kesalahan dalam penentuan waktu pemberangkatan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan, oleh karena itu mereka dengan teliti akan menentukan waktu pemberangkatan yang tepat. Penentuan hari-hari

pemberangkatan biasanya dilakukan pada saat-saat pertengahan bulan Oktober atau awal bulan Nopember.

Hari pemberangkatan ditentukan berdasarkan tradisi dan kebiasaan nelayan setempat mereka percaya ada hari-hari baik untuk merencanakan melaksanakan sesuatu. Jika sudah sampai pada waktu tersebut pemberangkatan harus dilaksanakan dan tidak boleh ditunda lagi. Semua biaya, termasuk biaya persiapan dan biaya perjalanan ditanggung oleh pemilik kapal. Semua biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kapal akan diperhitungkan setelah operasi penangkapan telah selesai.

c. Operasi Penangkapan Ikan

Ikan-ikan yang ditangkap dengan alat tangkap pole and line di lokasi penangkapan disortir berdasarkan jenis dan ukuran, selanjutnya dimasukkan ke dalam peti ikan dengan cara disusun rapi dan ditaburi dengan curahan es yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Penanganan hasil tangkapan tersebut dilakukan oleh anak buah kapal yang dipimpin oleh ABK juragan. Penanganan ikan tersebut dimaksudkan agar ikan-ikan hasil tangkapan tadi dapat dipertahankan kualitasnya hingga dilakukan pemasaran.

Setelah melakukan operasi penangkapan, setibanya di daratan, pihak pemilik kapal segera memasarkan ikan hasil tangkapan mereka. Biasanya hasil tangkapan ikan tersebut dijual kepada dibo-dibo. Pada para anak buah kapal yang baru tiba melakukan operasi penangkapan

ikan mendapat insentif dari pemilik kapal dan selain itu juga menerima “ikan makan” secukupnya yang dikoordinir oleh juragan.

Bagi hasil dilakukan setelah dikeluarkan total biaya operasional untuk selanjutnya dilakukan bagi hasil dengan penerapan sistem “ Bagi Dua “ yaitu pihak pemilik kapal mendapatkan seperdua bagian sebagai pemilik kapal dan seperdua bagian diberikan pada anak buah kapal sebanyak 15 orang. Sebagai tanda terima kasih pihak pemilik kapal memberikan hadiah kepada ABK juragan dan boy-boy sebesar satu bagian status ABK, sedangkan ABK mesin mendapatkan tambahan seperdua bagian dari ABK biasa. Pemberian hadiah ini diambil dari bagian pemilik kapal yang diterima dari sistem penerapan bagi dua tadi.

Sebagai lembaga sosial kelompok nelayan, pemilik kapal memberikan pelayanan kepada anak buah kapal yang membutuhkan pinjaman uang dengan prosedur yang sederhana dan tanpa bunga, dengan pengembalian pinjaman dilakukan pada saat bagi hasil periode penangkapan berikutnya. Hal lain yang dilakukan dalam lembaga sosial ini adalah kebersamaan pemilik kapal dan anak buah kapal untuk turut meringankan beban sesama anggota kelompoknya. Pada Tabel 4.9 berikut dirincikan hasil analisis deskripsi lembaga sosial kelompok nelayan *Pole and Line* Kelurahan Tomolou.

Tabel 4.9 Hasil Analisis Deskripsi Lembaga Sosial Kelompok Nelayan *Pole and Line* Kelurahan Tomalou

No	Uraian	Karakteristik (Jenis, Fungsi dan Aktifitas)
1	Struktur Keanggotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik kapal 2. Juragan 3. ABK Mesin 4. ABK boy-boy 5. ABK biasa
2	Tenaga Kerja (anggota ABK)	15 orang
3	Waktu Operasi Penangkapan	Setiap res 2 – 5 hari
4	<i>Fishing Ground</i>	Kabupaten Halmahera Selatan Pulau Bacan atau Mangoli Kabupaten Sula.
5	Sistem Bagi Hasil	Bagi dua <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya operasional dikeluarkan 2. Pemberian hadiah
6	Waktu Bagi Hasil	Setelah 1 bulan 5 res atau 1 trek
7	Pemasaran	Dilakukan pemilik kapal
8	Jaminan bagi ABK	<ol style="list-style-type: none"> 1. diberikan sesuai keperluan, dengan pengembalian saat bagi hasil. 2. Strategi pemilik kapal mempertahankan ABK
9	Pengangkatan Juragan	Dilakukan pemilik kapal
10	Pengangkatan ABK	Dilakukan oleh juragan dengan berkonsultasi dengan pemilik kapal

Sumber : Data Primer setelah Diolah, 2009

C. Ciri Ekonomi Nelayan *Pole and Line* Tomolou

1. Penerapan Sistem Bagi Hasil

Dalam kelompok sosial ekonomi di masyarakat nelayan pesisir berlaku sistem bagi hasil yang berbeda antara satu dengan yang lainnya yang sangat dipengaruhi oleh adat kebiasaan setempat. Sistem bagi hasil yang berlaku sampai saat ini yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat nelayan adalah sebagian besar masih dipengaruhi oleh modal pemilik alat yang dilaksanakan menurut adat kebiasaan setempat (Manadiyanto, 1988). Setelah dilakukan pengkajian tentang sistem bagi hasil dalam sosial kelompok nelayan pesisir pantai Tomalou Kota Tidore dengan menggunakan alat tangkap pole and line, adapun penerapan bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

Sistem bagi hasil dalam lembaga sosial kelompok nelayan Tomalou menerapkan "Sistem Bagi Dua", yaitu satu bagian pemilik kapal dan satu bagian untuk anak buah kapal (juragan + ABK biasa), dimana pelaksanaan bagi hasilnya dilakukan pada saat setelah selesai satu kali trip atau satu siklus kegiatan operasi penangkapan. Dalam kaitan ini penentuan satu siklus penangkapan ikan merupakan hak pemilik kapal, hal ini dilakukan karena secara kebetulan seluruh anak buah kapal masih merupakan keluarga atau kerabat.

Penerapan bagi hasil "Sistem Bagi Dua" pihak pemilik kapal mendapatkan satu bagian dan satu bagian untuk anak buah kapal. Apabila penerapan bagi hasil tersebut dipresentasikan, maka pihak pemilik kapal menerapkan 50% dan pihak anak buah kapal mendapatkan 50%. Melalui kegiatan penelitian ini dalam lembaga sosial kelompok nelayan yang memiliki

jumlah anak buah kapal sebanyak 15 orang, maka bagian yang diterima setiap anak buah kapal masing-masing 3,34% dari nilai penerimaan bersih.

Dari bagi hasil ini yang diperoleh pemilik kapal sebanyak 50% dikeluarkan sebagian untuk juragan sebagai bonus sebanyak 1 bagian sesuai dengan besarnya hasil yang diterima dari statusnya sebagai anak buah kapal biasa yaitu 3,34% atau $1 \times 3,34\%$ jadi yang diterima yaitu 6,68 %. Selain itu pihak pemilik kapal juga memberikan bonus kepada anak buah kapal boy-boy sebanyak 1 bagian dari besarnya nilai yang diterima sebagai anak buah kapal biasa, jadi yang diterima yaitu 6,68 %.

Berdasarkan uraian itu diketahui nilai penerimaan bagi hasil dengan "Sistem Bagi Dua" terhadap lembaga sosial kelompok nelayan (pole and line) dengan jumlah anak buah kapal 15 orang, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.10. berikut ini :

Tabel 4.10. Nilai Penerimaan Sistem Bagi Hasil Anggota Kelompok Nelayan Pole and Line Tomolou

No	Peran	Pembagian	Jumlah (%)
1	Pemilik Kapal	50% - 6,68% (1 Orang)	43,32
2	ABK Juragan	3,34% + 3,34% (1 Orang)	6,68
3	ABK Boy-boy	3,34% + 3,34% (1 Orang)	6,68
4	ABK Mesin	3,34% (1 Orang)	3,34
5	ABK Biasa	3,34% (12 Orang)	43,31
			100

Sumber : Data Primer Setelah diolah, 2009.

2. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil

Kajian lembaga sosial Kelompok Nelayan Kelurahan Tomalou dengan penerapan "Sistem Bagi Dua", dengan jumlah anak buah kapal 15 orang, menunjukkan bahwa terdapat 30 bagian yang dibagi bersih setelah dikeluarkan total biaya operasional. Sehubungan dengan itu maka pihak pemilik kapal mendapatkan bagian (43,32%) setelah dikeluarkan 1 bagian bonus untuk ABK juragan dan 1 bagian untuk ABK Boy-boy. Adapun pihak ABK juragan mendapatkan 2 bagian (6,68%) dimana 1 bagian yang diterimanya sebagai ABK biasa dan 1 bagian yang merupakan bonus atau hadiah dari pemilik kapal. Selanjutnya ABK Boy-boy juga mendapatkan 2 bagian (6,68%) dimana 1 bagian yang diterimanya sebagai ABK biasa dan 1 bagian yang merupakan bonus atau hadiah dari pemilik kapal. Adapun setiap ABK biasa sebanyak 13 orang (termasuk ABK mesin) mendapatkan 1 bagian (3,34%).

Berdasarkan kajian penelitian sistem bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga sosial kelompok nelayan Tomolou, menunjukkan keseimbangan dalam bagi hasilnya, dimana pihak pemilik kapal mendapatkan bagian 43,32% dan anak buah kapal mendapatkan 56,68%. Dengan demikian pihak anak buah kapal dalam menerima bagi hasil tersebut lebih dari 40%, dimana hal ini sesuai menurut aturan Undang-undang Bagi Hasil Perikanan No.16 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa bagi hasil perikanan laut yang menggunakan kapal motor diperuntukkan nelayan buruh (pekerja) menerima bagian minimal 40%.

3. Distribusi Pendapatan

Jenis ikan tangkapan, jumlah hasil tangkapan, harga jual ikan, penggunaan biaya operasional, besarnya pengenaan pajak restribusi dan

pemberian bonus adalah hal-hal yang mempengaruhi pendapatan masyarakat nelayan. Berdasarkan kaitan tersebut melalui kegiatan penelitian ini mengkaji nilai penerimaan dari sistem bagi hasil yang diberlakukan dalam kelompok masyarakat nelayan dengan alat tangkap pole and line.

Kelompok nelayan Tomalou dalam operasi penangkapan ikan mempekerjakan 15 orang anak buah kapal termasuk juragan. Kegiatan operasi penangkapan ikan sekali melaut berlangsung mulai dari 2 sampai 5 hari dengan memperoleh pendapatan dari penjualan ikan 17.000.000,-. Sehubungan dengan 1 trek operasi penangkapan ikan yang berlangsung selama 1 bulan atau sekitar 5 kali melaut, maka diperkirakan nilai penjualan hasil tangkapan ikan yang diperoleh sebesar Rp. 85.000.000,-. Setelah dikeluarkan pengeluaran total biaya operasional dengan ongkos sekali melaut Rp. 10.000.000,- sekaligus biaya perbaikan perahu dan alat tangkap setiap 1 trek sebesar Rp. 1.500.000,- maka diperkirakan penerimaan hasil bersih hasil penjualan ikan tersebut selama satu trek atau satu siklus operasi penangkapan ikan adalah Rp. 33.500.000.

Mengacu pada pola bagi hasil lembaga sosial kelompok nelayan Tomolou yang menerapkan sistem bagi dua, maka pihak pemilik kapal menerima pendapatan Rp. 16.750.000,- namun karena pihak pemilik kapal memberikan bonus kepada ABK juragan Rp. 1.116.600,- dan ABK Boy-boy Rp. 1.116.600,- maka sisa bersih yang diterima pemilik kapal yaitu Rp. 14.516.800,- atau sekitar 43,32%.

Selama 1 trek atau satu siklus operasi penangkapan pemilik kapal mengeluarkan insentif untuk seluruh ABK (15 Orang) Rp. 250.000,-

(Rp.50.000,-/trip), jadi keseluruhan ($15 \times 5 \times 50.000$) = Rp. 3.750.000. Dengan demikian sisa total penerimaan pendapatan pemilik kapal dalam 1 siklus adalah Rp. 10.766.800,- Selain itu pihak pemilik kapal menanggung beban biaya penyusutan kapal sebesar 1.500.000,-setiap siklus penangkapan jadi pendapatan bersih yang diterima pemilik kapal yaitu Rp. 9.266.800,-

Anak buah kapal juragan menerima pendapatan sebagai status ABK biasa Rp. 1.116.600,- Selain itu mendapatkan bonus dari pemilik kapal sebesar 1 bagian yaitu Rp. 1.116.600,- Sehingga total penerimaannya adalah Rp. 1.497.272,- atau sekitar 9,09 % kemudian ABK juragan menerima biaya hidup sebesar Rp. 50.000,- setiap selesai melaut (1 trip) dari pemilik kapal karena dianggap berjasa dalam operasi penangkapan ikan. Berdasarkan hal itu maka pendapatan keseluruhan dalam 1 siklus penangkapan yaitu Rp. 2.483.200,-, begitu juga anak buah kapal boy –boy.

Anak buah kapal biasa menerima pendapatan sebagai status ABK biasa Rp. 1.116.666,- atau sekitar 3,34%. Selain itu mendapatkan biaya hidup sebesar Rp.50.000 setiap selesai melaut dari pemilik kapal. Berdasarkan hal itu maka pendapatan keseluruhan dalam 1 siklus penangkapan yaitu Rp. 1.366.600,-.

Apabila pihak pemilik kapal yang menerima pendapatan terbesar dibandingkan ABK biasa yang menerima pendapatan terkecil, maka posisi perbandingannya 1 : 8,3 Mengacu pada undang-undang bagi hasil perikanan tahun 1964 yang diperbolehkan perbandingan bagi hasil antara bagian yang terbanyak dan bagian yang terkecil tidak boleh lebih dari 1 : 3. Dengan

demikian distribusi pendapatan dalam lembaga sosial kelompok nelayan Tomolou belum menunjukkan keseimbangan.

Menurut Suyanto (1993) tekanan-tekanan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat nelayan berakar dari faktor-faktor kompleks yang berkaitan. Faktor-faktor tersebut salah satunya adalah ketimpangan dalam sistem bagi hasil. Fenomena ini juga dijumpai dalam masyarakat nelayan di desa Tomolou yang menunjukkan ketimpangan dalam sistem bagi hasil yang dilakukan di daerah tersebut.

Mencermati hal tersebut di atas terdapat beberapa hal yang berpengaruh dalam pemeratan pendapatan tersebut sebagai berikut :

1. Dalam penerapan sistem bagi hasil, kelompok nelayan dengan jumlah anak buah kapal 15 orang melaksanakan bagi hasil dengan sistem bagi dua, dimana pihak pemilik kapal mendapat 1 bagian dan pihak anak buah kapal mendapat 1 bagian yang harus dibagi lagi sebanyak 15 orang sesuai anak buah kapal yang ada. Berdasarkan hal itu bagi hasil tersebut menempatkan anak buah kapal dalam posisi yang dirugikan.
2. Dalam kaitannya dengan biaya operasional oleh pihak pemilik kapal telah mengambil keuntungan karena dalam biaya operasional dibebankan kepada anak buah kapal tanpa harus melalui musyawarah karena posisi anak buah kapal yang tidak memiliki posisi tawar. Padahal menurut undang-undang bagi hasil perikanan No. 16 tahun 1964 untuk kegiatan usaha perikanan laut yang menjadi tanggungan pemilik kapal yaitu ongkos pemeliharaan, perbaikan perahu, alat-alat yang mengalami penyusutan, biaya eksploitasi seperti solar (BBM), es

dan sebagainya. Adapun yang menjadi tanggungan bersama antara pemilik kapal dan anak buah kapal yaitu ongkos lelang, uang rokok, biaya perbekalan selama di laut, dana kesejahteraan dan lain-lain.

D. Bentuk Kegiatan Kelompok Masyarakat Nelayan Tomolou Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Laut dan Pelestarian Lingkungan

1. Bentuk Kegiatan Kelompok Masyarakat Nelayan dalam Pemanfaatan Sumberdaya Laut

Bentuk kegiatan kelompok masyarakat nelayan Tomolou dalam pemanfaatan sumberdaya hayati laut adalah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Kegiatan perencanaan
2. Kegiatan pelaksanaan
3. Kegiatan pemanfaatan
4. Kegiatan pemantauan dan evaluasi sumberdaya hayati perairan.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh kelompok nelayan dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan secara berkelompok terdiri dari kegiatan perencanaan yang meliputi persiapan, penentuan anak buah kapal, penyiapan bekal dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan ke tahap pelaksanaan yang meliputi kegiatan pemberangkatan menuju lokasi penangkapan hingga kegiatan operasional penangkapan ikan dan dilanjutkan ke tahap pemanfaatan dimana kelompok nelayan melakukan usaha penjualan dan pemasaran hasil penangkapan mereka.

Tahap terakhir adalah tahap kegiatan pemantauan dan evaluasi sumberdaya hayati perairan yang meliputi kegiatan yang dilakukan

nelayan tersebut baik perindividu maupun berkelompok dalam memantau kegiatan di laut yang dapat mengganggu ekosistem perairan laut (Syahrir, 2005). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok nelayan Tomolou dalam aktifitasnya melakukan usaha penangkapan ikan yaitu :

a. Kegiatan perencanaan

Bentuk kegiatan kelompok masyarakat nelayan Tomalou dalam perencanaan pengelolaan (pemanfaatan) sumberdaya hayati pesisir dengan unit analisis kelompok nelayan pole and line terdiri atas persiapan, penentuan anak buah kapal, perbaikan dan pemeliharaan alat penangkapan, penyiapan bekal, bahan makanan, surat-surat, dan upacara selamatan.

b. Kegiatan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan merupakan tahap kegiatan berikutnya dalam bentuk kegiatan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hayati pesisir. Kegiatan ini meliputi: kegiatan pemberangkatan berupa upacara adat menjelang pemberangkatan ke daerah penangkakan ikan (*Fishing Ground*) pada acara ini pemilik kapal akan membaca doa yang diikuti oleh seluruh anak buah kapal kemudian naik ke perahu yang akan berangkat. Setelah membaca doa pemilik perahu akan menimba air laut lewat kedua telapak tangannya dan membasuh ke perahu yang akan digunakan, setelah itu perahu diberangkatkan.

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan Operasi penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan yang telah dituju. Umumnya kelompok nelayan yang mempergunakan pole and line ini mempersiapkan masing-masing pancing yang akan mereka gunakan kemudian anak buah kapal boy-boy akan membuang umpan di daerah yang telah dikeker oleh juragan sebagai tempat berkumpulnya ikan-ikan, setelah itu sebelum kegiatan memancing dimulai oleh semua anak buah kapal, terlebih dahulu boy-boy memercikkan air dilokasi ikan-ikan berkumpul ini agar ikan-ikan tidak kaget apabila pancing-pancing bergantian turun.

Pengetahuan juragan tentang lokasi tempat berkumpulnya ikan-ikan didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan (pengalaman) akan keadaan cuaca dan kondisi laut. Apabila terdapat buih-buih air yang banyak dan ada kayu mengapung kemudian di atasnya banyak burung-burung pemakan ikan maka itu merupakan tanda-tanda berkumpulnya ikan (hasil wawancara dengan juragan Farah, 42 tahun). Pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan lewat pengalaman tersebut sudah merupakan suatu kebiasaan dari masyarakat setempat dan mereka percaya bahwa dengan diadakannya upacara selamatan sebelum berangkat ke daerah penangkapan adalah hal yang mutlak mereka lakukan agar para dewa air memberikan rezeki pada mereka berupa hasil tangkapan ikan yang banyak, apabila kegiatan upacara tersebut tidak dilaksanakan mereka percaya mereka akan gagal dalam operasi penangkapan ikannya.

Perilaku dan cara berfikir dari masyarakat nelayan sesungguhnya merupakan keterangan yang didapatkan berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam usaha penangkapan ikan di daerah ini. Dalam artian bahwa apa yang dilakukan oleh para nelayan tersebut masih merupakan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka.

c. Kegiatan Pemanfaatan

Kegiatan kelompok masyarakat nelayan dalam berbagai unit usaha penangkapan ikan dalam upaya pemanfaatan sumberdaya hayati perairan, tidak terlepas dari upaya melakukan penjualan atau pemasaran hasil tangkapan yang mereka peroleh.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Lingkungan Empat merupakan lingkungan dimana penduduknya mempunyai aktifitas tinggi jika dibandingkan dengan keadaan di lingkungan lainnya. Hal ini disebabkan karena pada lingkungan Empat terdapat Tempat Pendaratan Ikan (TPI), yang memungkinkan terjadinya interaksi antara masyarakat lokal dan masyarakat luar (pelaku ekonomi) dalam melakukan transaksi dari hasil tangkapan yang dilakukan oleh kelompok nelayan Tomolou. Pelaku-pelaku ekonomi tersebut terdiri dari Pemilik kapal, para anak buah kapal, para dibo-dibo, pedagang pengecer, dan pedagang ikan skala kecil.

Pendaratan ikan terjadi pada pagi hari sekitar pukul 20.00 WIT dari hasil tangkapan kelompok nelayan pole and line tadi. Kesibukan di TPI mulai terlihat pada jam 19.00 WIT, untuk menunggu datangnya kapal-kapal ikan dari kelompok nelayan yang melaut dan akan

menangani hasil tangkapan untuk dimasukkan ke palka-palka tempat penampungan ikan yang telah diberi es batu. Pada pagi harinya jam 05.30 pemilik kapal mulai terlihat sibuk bertransaksi dengan dibo-dibo atau para pembeli lainnya. Para pembeli terdiri dari para pedagang ikan lokal maupun dari luar Tomolou dari yang berjalan kaki hingga menggunakan motor sampai mobil. Harga-harga ikan ditentukan berdasarkan hasil penawaran antara pemilik kapal sebagai pemasaran hasil tangkapan nelayan kepada pedagang-pedagang ikan. Selain itu harga ikan juga ditentukan oleh jenis ikan yang ditangkap. Setibanya di TPI masing-masing anak buah kapal membawa hasil tangkapannya kepada pemilik kapal dan selanjutnya urusan penjualan dan pemasaran hasil tangkapan sepenuhnya diserahkan kepada pemilik kapal yang telah menjadi bagian dari peranannya memimpin dan mengorganisasikan kelompok.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem bagi hasil yang mereka perlakukan secara umum yaitu sistem bagi dua, sistem pembagiannya dilakukan setelah dikeluarkan biaya operasional penangkapan. Berdasarkan keterangan dari informan dilokasi penelitian, anggota-anggota kelompok nelayan (Anak buah kapal juragan, dan ABK biasa) biasanya tidak ikut dalam transaksi penjualan hasil tangkapan, karena mereka sangat menghormati dan percaya pada pemilik kapal, berapapun yang dikatakan oleh pemilik kapal kepada para anggota kelompoknya sebagai hasil penjualan bersih yang akan dibagi, mereka akan percaya.

Dari uraian di atas dapat disarikan bahwa kegiatan kelompok nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya hayati perairan telah berlangsung dalam bentuk :

- i. Pemasaran hasil tangkapan mampu dilakukan sendiri oleh pemilik kapal dengan negosiasi dengan pedagang ikan baik yang lokal maupun pedagang yang datang dari luar.
2. Adanya pembagian peranan yang jelas antara urusan kegiatan produksi yang sepenuhnya ditangani oleh Anak Buah Kapal Juragan sebagai pemimpin operasional penangkapan beserta anak buah kapal biasa yang menjadi anggotanya dan urusan pemasaran yang ditangani oleh pemilik kapal.
3. Pembagian hasil kerja dengan sistem bagi hasil dengan aturan yang diistilahkan sebagai " bonus " masih memungkinkan anak buah kapal mendapatkan penghasilan tambahan.

d. Kegiatan monitoring dan Evaluasi

Kegiatan kelompok masyarakat nelayan dalam proses monitoring atau pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumberdaya hayati pesisir, berkaitan erat dengan hasil pekerjaan yang mereka lakukan selama musim penangkapan berlangsung. Mulai tahap perencanaan, pemberangkatan, kegiatan operasi penangkapan ikan di laut, sampai pada penjualan dan pembagian hasil merupakan hal yang mendasar dan menjadi bahan diskusi bagi nelayan di dalam unit masing-masing kelompok.

Hambatan yang dihadapi di daerah penangkapan (laut) serta kurangnya hasil tangkapan ikan selama operasi penangkapan ikan di musim penangkapan ikan merupakan suatu tanda bagi nelayan bahwa upacara adat yang dilakukan sewaktu pemberangkatan tidak berlangsung dengan baik. Sesuai dengan kajian Burger (1998) bahwa : Petani/nelayan tidak melihat alam sebagai sesuatu yang harus dikuras untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, tetapi berusaha untuk menjaganya melalui aturan-aturan yang sangat dihargai sesama. Petani/nelayan sering melakukan upacara-upacara ritual dalam setiap kegiatannya sebagai simbolisasi dari harapan dan kehendak agar Yang Maha Agung dan Bijaksana tetap membuat alam bersahabat dengannya.

Selain itu ada sanksi adat nelayan yang berlaku bagi setiap anggota kelompoknya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dalam kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan selama musim tangkap berlangsung. Apabila seorang anak buah kapal diketahui menjual hasil tangkapannya secara diam-diam atau diketahui dengan anggota kelompok yang lain dan melaporkan pada pemilik kapal, maka sanksi yang diberlakukan kepadanya yaitu dipecat sebagai anggota kelompok dan kelompok nelayan yang lain tidak bersedia menerimanya sebagai anggota kelompok mereka.

Ketentuan yang dilakukan di atas, adalah salah satu unsur budaya nelayan yang merupakan tradisi leluhur mereka. Karena ketentuan-ketentuan itu bersumber dari aturan-aturan adat, maka aturan-aturan

kenelayanan yang ada di daerah ini adalah ketentuan adat perikanan atau kenelayanan yang diberlakukan dalam sistem sosial mereka.

2. Kegiatan Kelompok Masyarakat Nelayan dalam Pelestarian Lingkungan Pesisir

Masyarakat nelayan pesisir Tomolou tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan yang merupakan bagian atau sub sistem dari sistem sosial masyarakat nelayan di Kota Tidore Provinsi Maluku Utara. Sebagai suatu sistem atau sub sistem memiliki hubungan yang teratur antara unsur-unsur atau proses-proses yang menyusunnya. Keteraturan hubungan tersebut dikenal dengan "keteraturan internal". Disamping itu juga dikenal dengan "keteraturan eksternal" berupa keteraturan hubungan antara masyarakat nelayan dengan kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat nelayan dan lingkungannya. Dalam hal ini adalah hubungan antara kelompok sosial kelompok nelayan dengan lingkungannya, khususnya dengan lingkungan alam fisik sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup yang hendak dimanfaatkan.

Di daerah Tomolou, keteraturan masyarakat nelayannya dijumpai baik keteraturan yang internal ataupun keteraturan yang eksternal diwujudkan oleh aturan-aturan kemasyarakatan atau norma yang mengatur tindakan (*action*), mengatur peranan (*role*) atau mengatur interaksi (*interaction*) di dalam masyarakat. Dalam hal ini ialah "norma-norma sosial" dalam arti norma-norma yang telah

melembaga di masyarakat atau telah menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat di daerah penelitian.

Kegiatan kelompok nelayan Tomolou dalam memantau pemanfaatan hasil sumber hayati perairan, dapat dilihat dari tindakan masyarakat yang mempunyai kesadaran yang tinggi dalam turut menjaga dan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya Undang-undang Perikanan No. 9 tahun 1985, 6 ayat (1), melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini dalam mengeksploitasi sumber hayati perairan yang mereka miliki yang bertentangan dengan aturan-aturan tersebut.

Kegiatan kelompok nelayan Tomolou terhadap pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber hayati perairan yang dilakukan oleh nelayan lokal terhadap nelayan yang datang dari luar desa, terkesan aktif. Hal ini dibuktikan oleh peran serta masyarakat nelayan dalam melakukan pemantauan baik secara sengaja maupun tidak dan peran aktifnya memberikan informasi melalui *juragan atau pemilik kapal* kepada aparat desa terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nelayan khususnya yang datang dari luar desa atau nelayan asing dalam melakukan upaya eksploitasi sumber hayati perairan di daerah penelitian. Begitu juga dengan nelayan mandiri, apabila mereka mendapatkan ada nelayan yang menggunakan alat penangkapan berupa bom yang diyakini dapat merusak lingkungan atau melihat adanya kapal asing yang menangkap ikan di daerah mereka, maka mereka segera melaporkan pada aparat setempat.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, sudah banyak informasi yang disampaikan oleh nelayan-nelayan tersebut yang ditindaklanjuti oleh aparat desa dan meneruskan laporan tersebut kepada instansi yang terkait, dan kemudian bersama-sama (aparat desa, kepolisian dan Dinas Kelautan dan Perikanan) melakukan kegiatan pemantauan dan pengecekan langsung dilokasi khususnya penggunaan bahan peladak, penggunaan racun dan penggunaan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah yang dilakukan oleh nelayan.

Kegiatan kelompok nelayan Tomolou untuk turut menjaga wilayah perairannya dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya merusak, lingkungan tidak terlepas dari persepsi masyarakat nelayan di terhadap keberadaan laut sebagai suatu sistem yang menjadi bagian dari dirinya, sehingga hubungan yang terjadi didalamnya adalah hubungan internal yang bersifat persuasif. Lautan dipandang sebagai tempat atau wilayah yang memberikan mereka sumber kehidupan dan penghidupan, yang merupakan warisan dari leluhur mereka yang harus dijaga untuk kepentingan masa kini dan masa akan datang.

D. Strategi dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Nelayan Tomolou dalam Pemanfaatan Sumberdaya Laut dan Pelestarian Lingkungan

1. Identifikasi Permasalahan

a. Kelompok Sosial Masyarakat Nelayan

Berdasarkan hasil kajian penelitian dalam bidang hubungan sosial kelompok masyarakat nelayan, maka dapat diutarakan masalah-masalah pokok sebagai berikut :

1) Dukungan lingkungan Kelompok Nelayan :

Hal ini disebabkan :

- Kelompok Nelayan Tomalou merupakan kelompok yang sudah lama terbentuk sehingga timbul nilai kekerabatan didalamnya.
- Kelompok sosial kelompok nelayan menjadi kuat kuat, karena disamping memiliki dimensi ekonomi juga dimensi sosial turut berperan di dalamnya.
- Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kelompok nelayan Tomalou masih berdasarkan tradisi daerah yang berdasarkan kesepakatan dari pemilik kapal.

2) Belum berfungsinya Lembaga-lembaga pendukung dalam peningkatan usaha produksi nelayan

Hal ini disebabkan karena :

- Belum lengkapnya perlengkapan alat tangkap yang di jual di KUD lokasi penelitian, sehingga bila nelayan membutuhkan peralatan alat tangkap, dan kebutuhan tertentu lainnya harus mengupayakan sendiri.
- Masih kurangnya komunikasi antara aparat pemerintah dengan masyarakat setempat sehingga KUD belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3) Peran pemerintah dan institusi terkait belum sesuai yang diharapkan

Hal ini disebabkan karena :

- Penetapan sejumlah peraturan perundang-undangan (PP, Kepres, Perda yang mengarah pada kepentingan nelayan dan berusaha

mencari alternatif pemecahan masalah masih bersifat "Top Down" (kebijakan bersumber dari atas ke bawah).

- Belum adanya sosialisasi sistem bagi hasil perikanan yang sesuai untuk diterapkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- Kurangnya pelatihan yang diberikan pada nelayan dan keluarga nelayan untuk meningkatkan usahanya serta diversifikasi usaha dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
- Kurangnya informasi dan sosialisasi kegiatan dalam upaya pemanfaatan sumberdaya hayati perairan selain menangkap ikan.
- Kurangnya sosialisasi upaya pelestarian lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan sumberdaya hayati perairan.

4) Rendahnya peran serta wanita

- Peran kerja antara wanita dan pria dalam rumah tangga belum berimbang.
- Waktu luang wanita cukup memadai namun belum dimanfaatkan dengan baik.

5) Sistem Usaha Nelayan

berdasarkan temuan di lapangan dalam bidang usaha nelayan, maka dapat ditemukan masalah pokok sebagai berikut :

a) Masih rendahnya penguasaan manajemen usaha

hal ini disebabkan karena :

- Masih terbatasnya teknik pengolahan ikan yang dimiliki oleh nelayan sehingga apabila hasil tangkapan ikan berlebih tidak

serta merta dapat meningkatkan pendapatannya karena produk perikanan yang mudah membusuk.

- Manajemen organisasi masih memakai manajemen lokal
- Lemahnya sistem penanganan dan teknik pasca tangkap yang dikuasai dan dilakukan oleh nelayan.
- Belum seimbangny hasil yang diperoleh oleh para nelayan khususnya dalam kelompok nelayan.

6) Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan masalah-masalah sarana dan prasarana yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung peningkatan keberhasilan usaha nelayan dan peningkatan kesejahteraan nelayan

Hal ini disebabkan oleh :

- Belum tersedianya fasilitas Cold Storage di lokasi Pendaratan Ikan.
- Belum tersedianya fasilitas pabrik es di lokasi penelitian.

2. Identifikasi Potensi dan Permasalahan Melalui Metode SWOT

Untuk memperoleh gambaran strategi pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan Tomalou maka dilakukan analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal .

A. Analisis Kondisi Lingkungan Internal

Dari hasil studi yang dilakukan diperoleh kondisi internal berupa kelemahan dari kelompok masyarakat nelayan Tomalou, namun juga terdapat

beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk dapat memberdayakan kelompok nelayan tersebut.

1. Kekuatan

1.1 Kelompok Nelayan yang Sudah Terbentuk

Kelompok masyarakat nelayan Tomalou yang sudah berkembang hingga saat ini dan mempunyai daya rekat yang kuat, karena disamping berdimensi ekonomi juga memiliki dimensi sosial. Kelompok sosial tersebut mencakup kelompok masyarakat nelayan, kelompok dengan sistem bagi hasil.

1.2. Hubungan Antara Masyarakat Nelayan dengan Alam

Hubungan antara masyarakat nelayan dengan alam menunjukkan suatu kekuatan masyarakat nelayan tersebut yang tetap mempertahankan norma-norma lama dalam mewujudkan kehidupan yang berdasarkan kepentingannya. Sehingga norma ini dapat mendukung daripada upaya pelestarian sumberdaya alam dalam pemanfaatan yang maksimal dan lestari, baik kelompok sosial nelayan atau nilai itu dalam bentuk upacara adat, maupun dalam bentuk pesan dari orang terdahulu dan lain sebagainya.

1.3. Teknik Penangkapan Ikan yang Dikuasai

Profil nelayan Tomalou umumnya cukup terampil dengan peralatan penangkapan yang dimilikinya yang merupakan sarana tangkap dengan kemampuan terbatas tetapi sukar untuk ditingkatkan ke arah modernisasi hal tersebut perlu didukung dengan penguasaan manajemen pasca tangkap termasuk penguatan kelembagaan pasar.

1.4. Etos Kerja yang Cukup Tinggi

Etos kerja masyarakat nelayan Tomalou dapat mendukung upaya pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan karena dengan semangat yang tinggi untuk bekerja dan didukung dengan ketersediaan sumberdaya alam yang potensial.

1.5. Ketersediaan Tenaga Produktif serta Wanita dan Keluarga Nelayan yang Masih Dapat Diandalkan

Ketersediaan tenaga kerja yang produktif masih cukup memadai ini ditandai dengan usia anak buah kapal yang masih muda berada dalam usia produktif (15 - 35 tahun). Waktu luang wanita dan keluarga nelayan sangat memadai untuk dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga nelayan.

2. Kelemahan

2.1 Keadaan Kelompok Nelayan tidak Terstruktur Secara Formal

Keadaan kelompok nelayan Tomalou tidak terstruktur secara formal, demikian pula aturan-aturan yang ada hanya disepakati secara tidak tertulis, mereka hanya berdasarkan kepercayaan. Sehingga kelompok nelayan dengan sistem bagi hasil ini bisa menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan bagi hasil didalamnya karena tidak ada posisi tawar bagi anak buah kapal.

2.2 Pendidikan Formal yang Rendah

Karena pendidikan formal yang rendah menyebabkan terbentuknya pola pikir yang sangat sederhana dan hanya menggantungkan kehidupannya dalam satu bidang saja. Pemanfaatan waktu luang pada musim paceklik terlewatkan begitu saja dan sebagian kebutuhan hidupnya masih tergantung pada pemilik kapal.

2.3 Adanya Modal Usaha yang Terbatas

Untuk menjalankan roda usaha kelompok nelayan pada umumnya banyak yang tidak memiliki anggunan atau jaminan serta izin usaha sehingga pihak perbankan tidak berani memberikan pinjaman atau kredit.

2.4 Nelayan Tradisional Masih Menggunakan Cara-cara Tradisional

Pengetahuan tentang adanya lokasi penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan tradisional dengan mengandalkan panca inderanya, sehingga hasil yang diperoleh sangat fluktuatif.

2.5 Keterbatasan Sosial Kelompok Nelayan di Luar Lingkungannya

Adanya keterbatasan sosial kelompok nelayan di luar lingkungannya menyebabkan kelompok ini tidak mampu mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar, serta tidak mampu melakukan kemitraan dengan kelembagaan lain yang dapat mendukung usaha mereka.

B. Analisis Kondisi Lingkungan Eksternal

Dari hasil studi yang dilakukan diperoleh gambaran faktor-faktor berupa peluang dan ancaman dari kelompok masyarakat nelayan tradisional.

1. Peluang

1.1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah tentang Undang-Undang No.16 tahun 1964 tentang bagi hasil yang lebih mengarah kepada keseimbangan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang didalamnya mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan wilayah laut, maka sumberdaya pesisir tidak lagi akan bersifat terbuka melainkan terkontrol oleh pemerintah dan masyarakat daerah, termasuk nelayan diharapkan

mampu bertanggung jawab mengendalikan pengelolaan sumberdaya perairan tersebut sehingga kelestariannya dapat tetap terjaga.

1.2. Potensi Laut yang Tinggi

Potensi laut yang tinggi menyebabkan kelompok masyarakat nelayan hanya berorientasi pada kelompok nelayan yang hanya berusaha di bidang penangkapan ikan, padahal mereka juga sangat berpotensi untuk mengembangkan diversifikasi usaha perikanan laut lainnya contohnya yaitu budidaya perikanan laut.

1.3. Kelompok Masyarakat Nelayan sebagai Kelompok Sosial Masyarakat

Selain sebagai suatu kelompok usaha penangkapan ikan dengan sistem bagi hasil, kelompok masyarakat nelayan ini juga sebagai suatu kelompok sosial kemasyarakatan sehingga dapat berkembang baru dengan melakukan kemitraan seperti (a) hasil produksi yang diperoleh di bagi antara pemilik kapal dan anak buah kapal sesuai dengan kesepakatan lisan bakal berkembang menjadi lembaga bagi hasil yang formal, (b) pemilik modal memberikan pinjaman atau panjar-panjar kepada pihak yang membutuhkannya bakal berkembang menjadi lembaga perkreditan, (c) jaminan kesehatan, jika terdapat anggota keluarga yang sakit akan berkembang menjadi lembaga asuransi, (d) Dukungan politis anak buah kapal kepada pemilik kapal seperti anak buah kapal rela berkorban jika pemilik kapal mendapat kesusahan dan anak buah kapal melibatkan diri jika pemilik kapal mengadakan suatu pesta atau upacara adat bakal berkembang menjadi lembaga politik. Berhubungan norma lama sebagai bagian kelompok nelayan masih dalam proses untuk berkembang menjadi

suatu lembaga baru, maka fungsinya masih dikatakan berada pada tingkat bekerjasama dengan pihak lain untuk bermitra.

1.4. Upaya Kemitraan Kelompok Nelayan

Kemitraan usaha dikembangkan dalam bentuk Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dimana pengusaha besar bertindak sebagai inti atau mitra pembina sedangkan nelayan bertindak sebagai plasma atau mitra-binaan. Inti berkewajiban untuk memberikan dalam aspek permodalan, teknologi, manajemen, pemasaran, sedangkan plasma dituntut berdedikasi mengikuti pembinaan dalam berbagai aspek yang dilakukan oleh inti. Baik inti maupun plasma dituntut untuk mentaati peraturan yang telah disepakati bersama, sehingga dapat dihindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Pemerintah daerah turut membantu kegiatan tersebut sebagai fasilitator sehingga kepentingan-kepentingan pribadi dapat tersingkirkan dan menghasilkan kepentingan bersama yang berjalan dengan baik.

1.5. Masyarakat Nelayan yang Homogen

Komunikasi masyarakat yang homogen menyebabkan hubungan kekerabatan antara masyarakat sangat tinggi. Homogenitas tersebut memudahkan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan karena nilai-nilai yang ada dimasyarakat juga relatif homogen.

2. Ancaman

2.1 Degradasi Lingkungan Fisik

Pendapatan keluarga nelayan yang rendah dan banyaknya waktu luang dapat menjadi pemicu cara berpikir pintas yang dampaknya dapat menimbulkan tindakan pengelolaan pesisir secara tidak ramah lingkungan seperti pengambilan batu-batu karang atau pasir laut secara tidak terkontrol untuk keperluan bahan bangunan rumah ataupun untuk keperluan lainnya oleh nelayan yang mana hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan penurunan potensi perikanan di daerah pesisir.

2.2 Kelembagaan Formal Masih Kurang Berperan

Kelembagaan formal belum banyak berperan dalam memberdayakan kelompok sosial masyarakat nelayan lokal yang sudah ada, dan terkadang mengabaikan kelompok-kelompok yang sudah ada yang daya rekatnya sangat kuat.

3. Strategi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Nelayan *Pole and Line* Tomalou

Berdasarkan identifikasi potensi dan masalah dalam kajian penelitian ini maka dapat dikemukakan strategi pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan dengan menggunakan analisis SWOT, dengan memanfaatkan kekuatan agar dapat memperoleh peluang strategi (*Strength – Opportunities = S – O*), meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang strategi (*Weaknesses – Opportunities = W – O*), menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman strategi (*Strength – Threats = S – T*), mengatasi ancaman dan meminimalkan ancaman strategi (*Weaknesses – Threats = W – T*) sebagai berikut :

A. Dengan memanfaatkan kekuatan agar dapat meraih peluang, strategi

SO antara lain :

1. SO-1 : Perlunya sosialisasi kepada kelompok masyarakat nelayan tentang kebijakan pemerintah melalui UU No.16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan sehingga distribusi pendapatan nelayan dapat lebih adil bagi semua anggota kelompok nelayan.
2. SO-2 : Keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan harus lebih proaktif dalam mengaplikasikan program-program terkait dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya hayati perairan secara lestari dan berkelanjutan serta melibatkan masyarakat nelayan setempat sehingga ada interaksi positif dari masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya hayati perairan dan kelestarian lingkungan pada khususnya.
3. SO-3 : Pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan melalui pelatihan dan pelibatan kelompok masyarakat nelayan dalam kegiatan sistem sekolah lapang untuk peningkatan pendapatan nelayan melalui diversifikasi perikanan seperti budidaya laut dan pengolahan hasil perikanan.

B. Dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, strategi WO antara lain :

1. WO-1 : Konsistensi penerapan Undang-undang No. 16 tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan menjadi kunci utama pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penerapan sistem bagi hasil yang lebih adil dan merata.

2. WO-2 : Pembinaan dan evaluasi kinerja fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sangat penting dalam upaya memaksimalkan pengembangan kegiatan pemberdayaan dalam menerapkan pengembangan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang berbasis lingkungan.
 3. WO-3 : Pembentukan lembaga baru yang formal untuk mendukung usaha perikanan nelayan dan mendukung sistem bagi hasil perikanan yang lebih profesional.
 4. WO-4 : Dengan diversifikasi usaha perikanan diharapkan dapat memberi manfaat untuk peningkatan pendapatan nelayan sehingga nelayan tidak hanya berorientasi pada penangkapan ikan di laut yang hasilnya fluktuatif.
 5. WO-5 : Dengan bantuan pihak perbankan diharapkan dapat menjadi penyedia modal bagi nelayan untuk lebih meningkatkan usahanya khususnya dalam pengelolaan sumberdaya hayati perairan.
- C. Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, strategi ST antara lain :
1. ST-1 : Membuat usaha percontohan budidaya perikanan laut dan pengolahan hasil perikanan yang melibatkan kelompok masyarakat nelayan dengan melakukan pelatihan-pelatihan.
 2. ST-2 : Penegakan aturan-aturan tentang pemanfaatan sumberdaya hayati perairan dengan berbasis lingkungan untuk kelestarian sumberdaya hayati perairan melalui penyuluhan dan

sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada kelompok masyarakat nelayan.

3. ST-3 : Memanfaatkan waktu luang wanita untuk ikut berpartisipasi dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga nelayan.

D. Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman, strategi WT antara lain :

1. WT-1 : Dalam pengembangan kegiatan-kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore harus lebih proaktif untuk menerima dan melibatkan masyarakat sehingga kegiatan yang dilakukan mendapat respon yang positif.
2. WT-2 : Keaktifan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan UU No 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan tidak hanya sebatas teori tetapi harus diterapkan pada sasaran dan pelaksanaannya bersifat " *Bottom Up*".
3. WT-3 : Peningkatan pendapatan nelayan diharapkan dapat dihasilkan setelah penerapan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait.
4. WT-4 : Peran aktif Dinas Kelautan dan Perikanan haruslah menjadi agenda utama dalam hal pembenahan kinerja, pentingnya penyadaran kepada masyarakat khususnya masyarakat nelayan akan pengelolaan sumberdaya hayati

perairan secara lestari dan berbasis lingkungan harus lebih ditingkatkan melalui sosialisasi kegiatan.

Setelah diidentifikasi dari strategi SO, strategi WO, Strategi ST, dan strategi WT, maka dibuatkanlah matriks analisis SWOT seperti pada Tabel 4.11 berikut ini :

Tabel.4.11 Analisis SWOT Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Nelayan Tomolou

Eksternal Internal	PELUANG (Opportunities = O)	ANCAMAN (Threats = T)
	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pemerintah (UU No. 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan, dan UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. - Peluang pasar terbuka luas - Kemajuan teknologi di bidang Perikanan - Aturan adat yang mendukung pemanfaatan lestari SDA laut 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas sumberdayahayati Laut yang dapat terancam keberlangungannya - Terbatasnya sarana dan prasarana - Aturan tidak tertulis dalam sistem bagi hasil yang dapat merugikan anggotanya. - Aktifitas Illegal fishing
KEKUATAN (Strenghts= S)	STRATEGI (S - O)	STRATEGI (S - T)
<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SDA yang potensial - Respon positif terhadap inovasi baru - Peran serta wanita dan tenaga produktif dari anggota keluarga nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi, Intervensi dan Implementasi Kebijakan-kebijakan pemerintah (UU No 16 Tahun 1964, UU No.22 tahun 1999) - Keaktifan Dinas Kelautan dan Perikanan. - Diversifikasi Usaha Nelayan - Mengembangkan sistem Penyuluhan, pelatihan dan system sekolah lapang bagi nelayan dan keluarganya - Keaktifan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan Program-programnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat usaha percontohan budidaya perairan laut yang dapat diterapkan di masyarakat nelayan setempat - Pelestarian lingkungan dengan melalui pendekatan nilai atau norma lama yang berlaku pada daerah tersebut - Mendorong partisipasi wanita dengan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan klg. - Identifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan - Meningkatkan kesadaran nelayan tentang pentingnya pelestarian lingkungan.
KELEMAHAN (Weaknesses= W)	STRATEGI (W - O)	STRATEGI (W- T)
<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya SDM akibat pendidikan formal yang rendah - Kelembagaan kelompok nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan, bimbingan, serta bantuan intensif mengenai teknologi pengolahan ikan - Penyempurnaan manajemen lokal menuju keperbaikan - Pembentukan lembaga baru 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan lembaga-lembaga baru yang didukung oleh norma-norrna lama - Kebijakan pemerintah harus bersumber dari bawah atau bersifat " Bottom Up"

<p>masih bersifat tradisional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat produksi perikanan masih rendah - Pola pikir nelayan yang masih tradisional - Orientasi pekerjaan nelayan hanya pada penangkapan ikan di laut 	<p>yang mendukung usaha nelayan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem bagi hasil yang lebih profesional dengan bantuan lembaga baru - Menciptakan lapangan kerja baru melalui diversifikasi usaha - Kepedulian pihak perbankan dalam menunjang modal nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengupayakan pelestarian lingkungan dengan dukungan aturan adat yang mendukung pelestarian lingkungan - Peningkatan pendapatan nelayan dan keluarganya sebagai hasil pelatihan yang diberikan. - Mengembangkan sistem diversifikasi pekerjaan bagi nelayan.
---	---	---

Dari matriks analisis SWOT pada Tabel 4.11 dapat dikelompokkan dalam tiga buah *cluster*, yaitu pemberdayaan masyarakat (*community development*), peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan upaya pelestarian lingkungan (*continuing environment*). Cluster tersebut sekaligus merupakan urutan pentahapan program prioritas untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tidore khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore.

A. Pemberdayaan masyarakat (*community development*)

1. ST-1 : Mengaktifkan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan dengan melakukan usaha percontohan budidaya perikanan laut dan pengolahan hasil perikanan oleh pemerintah dan dilakukan oleh kelompok masyarakat nelayan.
2. SO-3 : Pengembangan pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan melalui pelatihan dan pelibatan kelompok masyarakat nelayan dalam kegiatan sistem sekolah lapang untuk peningkatan pendapatan nelayan melalui diversifikasi perikanan seperti budidaya laut dan pengolahan hasil perikanan.
3. ST-1 : Membuat usaha percontohan budidaya perikanan laut dan pengolahan hasil perikanan yang melibatkan kelompok masyarakat nelayan dengan melakukan pelatihan-pelatihan.

4. WO-3 : Pembentukan lembaga baru yang formal untuk mendukung usaha perikanan nelayan dan mendukung sistem bagi hasil perikanan yang lebih profesional.
5. ST-3 : Memanfaatkan waktu luang wanita untuk ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga nelayan.

B. Peningkatan Kapasitas (*capacity building*)

1. SO-1 : Sosialisasi, Intervensi dan implementasi UU No.16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.
2. SO-3 : Pelatihan dan pelibatan kelompok masyarakat nelayan dalam kegiatan sistem sekolah lapang untuk peningkatan pendapatan nelayan melalui diversifikasi perikanan seperti budidaya laut dan pengolahan hasil perikanan.
3. WT-4 : Peningkatan pendapatan nelayan diharapkan dapat dihasilkan setelah penerapan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait.

C. Upaya pelestarian lingkungan (*continuin environment*)

1. SO-2 : Keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan harus lebih proaktif dalam mengaplikasikan program-program terkait dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya hayati perairan secara lestari dan berkelanjutan serta melibatkan masyarakat nelayan setempat sehingga ada interaksi positif dari masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumberdaya hayati perairan dan kelestarian lingkungan pada khususnya.

2. ST-2 : Penegakan aturan-aturan tentang pemanfaatan sumberdaya hayati perairan dengan berbasis lingkungan untuk kelestarian sumberdaya hayati perairan melalui penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada kelompok masyarakat nelayan.
3. WT-3 : Melaksanakan pelestarian lingkungan dengan dukungan aturan adat yang mendukung pelestarian lingkungan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Karakteristik kelompok nelayan di Kelurahan Tomalou adalah melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *Pole and Line*. Kelompok nelayan ini melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menentukan *fishing ground* berdasarkan hasil pemantauan juragan sebagai pemimpin operasional penangkapan ikan. Sebelum melakukan operasional penangkapan ikan dilakukan acara selamatan sebagai simbol kepercayaan masyarakat setempat.
2. Ciri ekonomi nelayan berdasarkan kajian penelitian adalah sistem bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga sosial kelompok nelayan Tomolou menerapkan “Sistem Bagi Dua”, yaitu satu bagian pemilik kapal dan satu bagian untuk anak buah kapal. Hasil analisis menunjukkan distribusi pendapatan pendapatan antara pemilik kapal dan anak buah kapal dalam lembaga sosial kelompok nelayan Tomolou 1 : 8,3 mengacu pada undang-undang bagi hasil perikanan tahun 1964 yang diperbolehkan perbandingan bagi hasil antara bagian yang terbanyak dan bagian yang terkecil tidak boleh lebih dari 1 : 3, dengan demikian distribusi pendapatan belum menunjukkan keseimbangan.
3. Berdasarkan hasil analisis SWOT strategi masyarakat nelayan dalam mengelola sumberdaya pesisir guna peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dapat ditempuh dengan melakukan 3 kluster strategi, yaitu

pemberdayaan masyarakat (*community development*), peningkatan kapasitas (*Capacity building*) dan upaya pelestarian lingkungan.

B. Saran

Untuk meningkatkan pendapatan anggota kelompok masyarakat nelayan diperlukan suatu intervensi kebijakan bagi hasil yang diterapkan di daerah pada khususnya bagi PEMDA melalui Dinas Perikanan dan Kelautan setempat agar bagi hasil pada nelayan dapat terdistribusi merata dan adil sehingga kehidupan ekonomi masyarakat nelayan dapat lebih baik.

Selain itu perlu adanya kegiatan alternatif di daerah pesisir yang dapat membuka lapangan kerja sekaligus dapat meningkatkan pendapatan nelayan setempat sebagai alternatif yaitu usaha budidaya laut yang dapat diterapkan di lokasi tersebut, dan hal ini perlu dukungan instansi terkait untuk memberikan bantuan dari segi teknis maupun pembiayaan.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto., (1996). *Kamus istilah perikanan*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Arifin, M., (2001). *Kelembagaan masyarakat desa*. Yogyakarta : Penerbit Universitas Gajah Mada.
- BPS., (2008). *Kota Tidore dalam angka*. Tidore : Badan Pusat Statistika Kota Tidore.
- Burger, H.D. dan Prayudi, 1960. *Sejarah Ekonomis dan Sosiologis Indonesia (Jilid I)*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Dahuri, R. (2001). *Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu (Edisi revisi)*. Jakarta : Penerbit Pradnya Paramita.
- Dianthani D., Haeruddin, Nurbambang, Purnomo, Saputra, Yulfiperius, (2003). *Pemberdayaan industri perikanan nasional melalui pengembangan budidaya laut dan pantai*. Makalah yang tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore, (2008). *Laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore 2007*. Tidore : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore.
- Kusnadi (2000). *Nelayan, strategi adaptasi dan jaringan sosial*. Bandung : Penerbit Humaniora Press.
- Kusnadi (2002). *Konflik sosial masyarakat nelayan*. Jember : Penerbit LkiS Yokyakarta.
- Lamrecth, R. (1991) *Prospek dan Masalah dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Usaha Perikanan*. Proceeding Seminar Nasional Usaha Peningkatan Produktivitas Peternakan dan Perikanan. 7 Oktober 1991. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bekerjasama dengan Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi (2001). *Terumbu karang di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bekerjasama dengan Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi.
- Mattulada. (1997). *Sketsa pemikiran tentang kebudayaan, kemanusiaan, dan lingkungan hidup*. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press.

- Mubiyarto dkk. (1984). *Nelayan dan kemiskinan studi ekonomi dan antropologi di dua desa pantai*. Jakarta : Penerbit CV. Rajawali.
- Mubiyarto (1988). *Sistem UDKP dan pembangunan desa terpadu PPSPK*. Yogyakarta : Penerbit Universitas Gadjahmada.
- Mubiyarto (2000). *Membangun sistem ekonomi*. Yogyakarta : Penerbit BPFE. Edisi Pertama.
- Nontji, A. (1993). *Laut nusantara*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Nort, D. (1981). *Structure and chage in economi history*. New York : Norton.
- Nybakken, W.J. (1988). *Biologi laut suatu pendekatan ekologis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pakpahan, A. (2000). *Membangun Indonesia masa depan. dalam pertahanan dan pangan (Bunga Rampai Pemikiran Menuju Ketahanan Pangan)*. Jakarta : Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Prabowo D., (2000). *Kelembagaan dan koordinasi produksi ketahanan TPH dalam membangun ketahanan pangan dalam*. Rudi Wibowo (Ed) Jakarta : Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Rangkuti, F. (2001). *Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Saad, S. (1994). *Sistem penguasaan wilayah perairan pantai. Thesis S2 Program Pascasarjana. Universitas Gajah Mada*.
- Sallatang, (1976). *Desa pantai di Sulawesi Selatan dan strategi pengembangannya*. Ujung Pandang : Penerbit Team Studi Pedesaan UNHAS.
- Sallatang, (1982). *Punggawa-Sawi suatu studi sosiologi kelompok kecil. Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Hassanudin Ujung Pandang*.
- Saptarini, D. (1995). *Pengelolaan sumber daya kelautan dan wilayah pesisir*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.
- Setyohadi, T. (2000). *Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan (Suatu tantangan bagi peran HNSI)*. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Pembangunan Kelautan Indonesia. Makassar.
- Schmid, A.A. (1987). *Properry Power and public choice : An inquiry into Law and Economic*. , New York : Praeger.

- Sekretariat Negara RI (1964). *Undang- Undang No.16 Tahun 1964*. tentang Bagi Hasil Perikanan. Jakarta : Sekretariat Negara RI.
- Soekanto, S., 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia.
- Sudibyo, (2002). *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Secara Berkesinambungan*. Makalah yang tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sugiarto. (1997). *Kinerja usaha penangkapan ikan pendukung pengembangan agribisnis perikanan di Jawa Tengah (Kasus Kodya Pekalongan)*. *Jurnal Agribisnis*, Vol. 1 hal.1.
- Sunarto, K. (1993). *Pengantar sosiologi*. Jakarta : Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Syaiful, M. (2003). *Perencanaan industri hasil perikanan di wilayah pesisir Propinsi Bengkulu*. Makalah yang tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Syaukani, M. (2004). *Konsep kelembagaan dalam mewujudkan sektor perikanan sebagai Primer Mover Perekonomian Nasional*. Makalah yang tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Usman dan Akbar, 1998. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Rokhman, A. (2003). *Implikasi globalisasi ekonomi terhadap pengembangan usaha perikanan*. Makalah yang tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Lampiran 1. Daftar Informan yang Di Wawancara Selama Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Ikhsan, M.Si	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore
2.	Sarah M.Saleh	Kepala kelurahan Tomalou
3.	Yusuf Hi.Abdullah	Ketua koperasi Pelita Hidayah
4	Hi. Ishak	Ketua Kelompok Nelayan

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 2. Daftar Beberapa Nama Kelompok Nelayan di Tomalou

No.	Nama	Jabatan
1.	Hi. Ishak	Ketua Kelompok Nelayan
2.	Hi. Hasan	Ketua Kelompok Nelayan
3	Hi. Saleh	Ketua Kelompok Nelayan
4	Hi. Mahmud R	Ketua Kelompok Nelayan
5	Hi Abdullah	Ketua Kelompok Nelayan
6	Hi. Jen	Ketua Kelompok Nelayan
7	Jumran farah	Ketua Kelompok Nelayan
8	Abubakar farah	Anggota Kelompok Nelayan
9	Sangaji	Anggota Kelompok Nelayan
10	Tamrin	Anggota Kelompok Nelayan

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 3. Rincian Biaya Operasional 1 Trip (5 hari)

No	Uraian	Harga Satuan	Jumlah
1	Solar	Rp. 480.000,- x 2 drum	Rp. 960.000,-
2	Es Balok	Rp. 10.000,- x 75 balok	Rp. 500.000,-
3	Minyak Kelapa	Rp. 10.000,- x 3 liter	Rp. 30.000,-
4	Minyak Tanah	Rp. 3.000,- x 10 liter	Rp. 30.000,-
5	Beras	Rp. 7.000,- x 25 kg	Rp. 175.000,-
6	Gula Pasir	Rp. 10.000,- x 7 kg	Rp. 70.000,-
7	Kopi	Rp. 15.000,- x 3 kg	Rp. 45.000,-
8	Rokok	Rp. 10.000,- x 55 bungkus	Rp. 550.000,-
Jumlah			Rp. 10.000.000,-

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah.

Lampiran 4. Transkrip Hasil Wawancara

Kelurahan Tomolou adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore, Propinsi Maluku Utara. Penduduk Kelurahan Tomalou pada tahun 2008 berjumlah 3138 jiwa. Jumlah wanita 1623 jiwa lebih banyak dari jumlah pria 1515 jiwa. Sebagian besar penduduk bergantung hidup pada sektor perikanan, dengan komoditi ikan. Dari jumlah penduduk yang sangat tergantung pada sektor perikanan ini sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

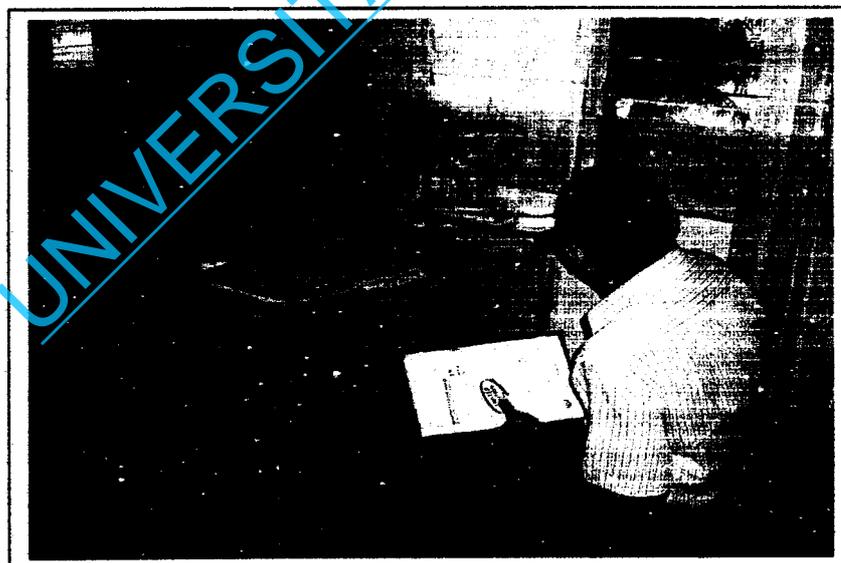
Perikanan tangkap merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang menjadi salah satu *prime mover* di kota Tidore Kepulauan karena kontribusinya cukup besar, yaitu 8291,8 ton/tahun atau 88,33 % dibandingkan perikanan budidaya dan pengolahan. Usaha perikanan tangkap yang dikelola di Kota Tidore Kepulauan terdiri dari berbagai jenis jaring dan pancing.

Nelayan Kelurahan Tomalou Setiap tahunnya pada musim-musim paceklik dimana tidak ada ikan mereka melakukan perjalanan menuju ke Kabupaten Halmahera Selatan atau ke Halmahera Utara untuk melakukan operasi penangkapan ikan. Kelompok nelayan di Desa Tomalou adalah kelompok nelayan yang melakukan usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap Pole and Line. Sistem bagi hasil dalam lembaga sosial kelompok nelayan Tomalou menerapkan "Sistem Bagi Dua", yaitu satu bagian pemilik kapal dan satu bagian untuk anak buah kapal.

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Kantor Lurah Tomalou Kec.Tidore Selatan Kota Tidore



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Kelurahan Tomalou

Lampiran 5 (Lanjutan)



Gambar 3. Wawancara Peneliti dengan Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore



Gambar 4. Wawancara Peneliti dengan Ketu Kelompok Nelayan Tomalou

Lampiran 5 (Lanjutan)



Gambar 5. Armada penangkapan Ikan Nelayan Tomalou

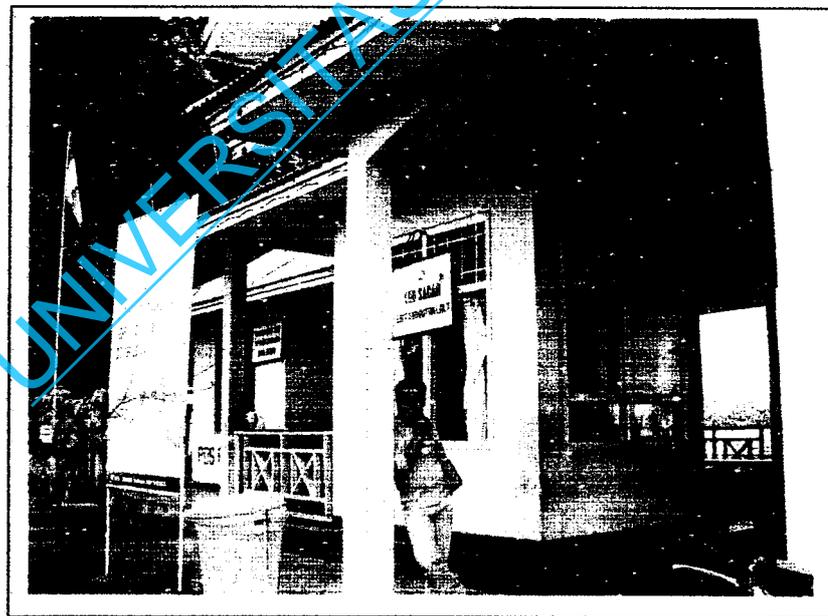


Gambar 6. Aktifitas Nelayan di Tempat Pendaratan Ikan

Lampiran 5 (Lanjutan)



Gambar 7. Koperasi Unit Desa Pelita Hidayak Kelurahan Tomalou



Gambar 8. Pelabuhan Transportasi Laut dari Ternate Ke Tidore

Lampiran 5 (Lanjutan)



Gambar 9. Keadaan Rumah Penduduk Kelurahan Tomalou



Gambar 10. Pengambilan Data Primer dari Ketua Kelompok dan Anggota Kelompok Nelayan